



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI

JL. LINGKAR BARAT III RT.15
KEL. KENALI BESAR KEC. ALAM
BARAJO KOTA JAMBI 36124

TELP : (0741) 3081183
FAX : (0741) 3081183

EMAIL : bptd-jambi@dephub.go.id

Nomor : **um.006/6/5/BPTD-JAMBI/2024**
Klasifikasi : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Monitoring Capaian
Kinerja (LMCK) Triwulan III BPTD Kelas II
Jambi Tahun 2024.

Jambi, 23 Oktober 2024

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kementerian Perhubungan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak Sesditjen diucapkan terima kasih.

Kepala Balai,



Dr. Drs. Benny Nurdin Yusuf, A.Md LLAJ., M.H.
NIP. 19700828 199403 1 007

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Kepala Bagian Perencanaan Setditjen Perhubungan Darat.



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi
Tahun 2024

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Pande Gede Semarapura	Penyusun Rencana dan Pelaporan	22/10/2024	
		M. Sidik Pramono	Pengelola Urusan Kerumahtanggaan	22/10/2024	
		Dina Safitri	Pengadministrasi Perkantoran	22/10/2024	
2.	Diperiksa	Alexander T.P Pardede	Kepala Subbagian Tata Usaha	23/10/2024	
3.	Disetujui	Alexander T.P Pardede	Kepala Subbagian Tata Usaha	23/10/2024	
		Herry Wanda	Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	23/10/2024	
		Ikra Surantha, S.T., M.T.	Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	23/10 - 2024	
		Riskan, A.Md LLAJ, S.E., M.M.	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan	23/10 - 2024	



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

LMCK

20
24

Laporan Monitoring Capaian Kinerja **Triwulan III**



BPTD Kelas II Jambi

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan RI

Kata **Pengantar**





KATA PENGANTAR

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi mengemban amanah menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat melalui suatu layanan transportasi darat.

Sebagai institusi publik, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.





Adapun isi dari Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III ini mencakup Revisi Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2024, serta tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja Tahun 2024.

Kami berharap Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Dibuat di Jambi
Pada tanggal 20 Oktober 2024

Kepala Balai,

Dr. Drs. Benny Nurdin Yusuf, A.Md. LLAJ., M.H.
NIP. 19700828 199403 1 007

Ringkasan **Eksekutif**





RINGKASAN EKSEKUTIF

Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma'aruf Amin melanjutkan kepemimpinannya melalui Kabinet Indonesia Maju periode Tahun 2019-2024 mengusung Visi "Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong". Visi tersebut diterjemahkan lebih ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMN periode 2020-2024. Pencapaian Visi Kabinet Kerja tersebut dapat terwujud apabila segenap jajaran pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda prioritas nasional.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020-2024, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi telah menetapkan Visi yang merupakan pengejawantahan dari Visi Kementerian Perhubungan 2020-2024 dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024, yaitu : Perhubungan Darat yang andal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong".

Rencana Strategis (Renstra) memuat 5 (lima) tujuan Pembangunan sub sektor Perhubungan Darat, yakni :

1. Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi;
2. Meningkatnya pelayanan transportasi darat;
3. Meningkatnya keselamatan transportasi darat;
4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat;
5. Meningkatnya birokrasi ditjen perhubungan darat akuntabel.

Dari tujuan diatas, dapat dijabarkan secara konkret ke dalam Sasaran Program. Setiap sasaran tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud. Pada Tahun 2024, ditetapkan 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) dan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) beserta targetnya.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan evaluasi kinerja tahun 2024, secara keseluruhan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi sudah baik.

Dari 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi tahun 2024, terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan sama dengan 100% ($IKK \geq 100\%$) dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% ($0\% \leq IKP \leq 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan jalan terealisasi sebesar 71% dengan capaian 71% (target 100%);
2. Jumlah terminal tipe A dan terminal barang yang beroperasi terealisasi sebesar 4 lokasi dengan capaian 100% (target 4 lokasi);
3. Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi sebesar 4 lokasi dengan capaian 100% (target 4 lokasi);
4. Persentase pelaksanaan SPM di Terminal Tipe A terealisasi 68,51% dengan capaian 72% (target 95%);
5. Persentase pelaksanaan SPM di Pelabuhan SDP terealisasi 25% dengan capaian 25% (target 100%);
6. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terealisasi 51% (target 100%);
7. Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat terealisasi 28% dengan capaian 158% (target 67%);
8. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan terealisasi 0 lokasi dengan capaian 0% (target 10 lokasi);
9. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan terealisasi 2.269 orang dengan capaian 151% (target 1.500 orang);

10. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor terealisasi 54% dengan capaian 68% (target 80%);
11. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran terealisasi 1 Lokasi dengan capaian 100% (target 1 Lokasi)
12. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat tercapai 69 dengan capaian 76,67% (target 90);
13. Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat tercapai 84,3 dengan capaian 93,67% (target 90).

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan atas setiap sistem manajemen yang dimiliki, antara lain melalui penerapan redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP), pelaksanaan program reformasi birokrasi, serta adaptasi terhadap teori/praktik terbaik dan terkini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang	1
I.2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
1.2.1. Bagan Struktur Organisasi.....	5
I.3. Sumber Daya Manusia.....	6
I.4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan.....	7
I.5. Sistematika Laporan.....	7
I.6. Uraian Singkat Perencanaan Strategis.....	11
I.7. Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	15

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja	22
II.2 Pengukuran Capaian Kinerja	22
2.2.1 SK 1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	27
IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	27
IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi	31
IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi	34
2.2.2 SK 2 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	37
IKK 2.1 Persentase pelaksanaan SPM di Terminal Tipe A	38
IKK 2.3 Persentase pelaksanaan SPM di Pelabuhan SDP	41
2.2.3 SK 4 Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat	44
IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	45
IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	48
IKK 3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan	52
IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	55
IKK 7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	58
IKK 7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP...	61
2.2.4 SK 5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	64
IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi Darat .	64
2.2.5 SK 1 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat dan Akuntabel	67
IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	67
II.3. Realisasi Anggaran	71

BAB III PENUTUP

III.1 Ringkasan Capaian	84
III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab	86

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024;
2. Perjanjian Kinerja Kepala Balai Tahun 2024;
3. Revisi I Perjanjian Kinerja Kepala Balai Tahun 2024;
4. Rencana Aksi Tahun 2024;
5. Revisi I Rencana Aksi Tahun 2024;
6. Monitoring Rencana Aksi per September Tahun 2024;
7. Lain-lain yang dianggap perlu.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Sumber Daya Manusia BPTD Kelas II Jambi	5
Tabel I.2.	Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi 2020-2024 sesuai Revisi Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024	12
Tabel I.3.	Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2024	14
Tabel I.4.	Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2024.....	16
Tabel I.5.	Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2024.....	19
Tabel II.1.	Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Triwulan II Tahun 2024.....	25
Tabel II.2.	Rincian Per Sumber Dana Pagu Tahun 2024 Per Triwulan III	71
Tabel II.3.	Rincian Per Jenis Belanja Pagu Tahun 2024 Per Triwulan III	71
Tabel II.4.	Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2024 Per Triwulan III	73
Tabel II.5.	Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2024 Per Triwulan III	74
Tabel II.6.	Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan per Jenis Belanja per Triwulan III.....	75
Tabel II.7.	Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Per Kegiatan Triwulan III	76
Tabel II.8.	Rincian Perbandingan pagu dan realisasi Tahun 2020-2024 sampai dengan Triwulan III.....	77
Tabel II.9.	Rincian Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan DIPA Tahun 2024 Per Triwulan III.....	78
Tabel II.10.	Rincian Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III.....	80
Tabel II.11.	Rincian Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III.....	80
Tabel II.12.	Rincian Sisa Anggaran Per Jenis Belanja	81
Tabel II.13.	Rincian Sisa Anggaran Per Sumber Dana	81
Tabel II.14.	Rincian Penggunaan Sumber Daya Keuangan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III	82
Tabel II.15.	Rincian Penggunaan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III	83
Tabel III.1.	Tabel Hasil evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggung jawab	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1.	Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 IKK Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	29
Gambar II.2.	Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 IKK Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi	32
Gambar II.3.	Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi	35
Gambar II.4.	Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A	39
Gambar II.5.	Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 IKK Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	42
Gambar II.6.	Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 IKK Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	46
Gambar II.7.	Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 IKK Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.....	49
Gambar II.8.	Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 IKK Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan.....	53
Gambar II.9.	Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	56
Gambar II.10.	Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor.....	59
Gambar II.11.	Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP	62
Gambar II.12.	Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	65
Gambar II.13.	Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024;
2. Perjanjian Kinerja Kepala Balai Tahun 2024;
3. Revisi I Perjanjian Kinerja Kepala Balai Tahun 2024;
4. Rencana Aksi Tahun 2024;
5. Revisi I Rencana Aksi Tahun 2024;
6. Monitoring Rencana Aksi per September Tahun 2024;
7. Lain-lain yang dianggap perlu.



BAB I

Pendahuluan

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*), maka diperlukan akuntabilitas publik sebagai pedoman penyelenggaraannya. Akuntabilitas ini merupakan salah satu kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap Instansi Pemerintah yang dalam hal ini sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing masing instansi pemerintah tersebut kepada masyarakat. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kementerian Perhubungan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi sebagai bagian dari instansi pemerintah wajib membuat Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024.

I.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Pasal 1 ayat 1 Balai Pengelola Transportasi Darat atau disingkat BPTD merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas :

Balai Pengelola Transportasi Darat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Terminal Tipe A, Terminal barang untuk umum, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, dan Pelabuhan Sungai, Danau, Penyeberangan, Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Sarana, Prasarana, Lalu lintas dan angkutan, serta Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas, Balai Pengelola Transportasi Darat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengelolaan Terminal Tipe A, Terminal barang untuk umum, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, dan Pelabuhan Sungai, Danau, Penyeberangan;
3. Pelaksanaan pengendalian keselamatan sarana dan angkutan jalan, keselamatan dan keamanan pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, serta melaksanakan kegiatan keperintisan;
4. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengendalian lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
5. Pelaksanaan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan;
6. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi terdiri atas:

1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan evaluasi kinerja, pengelolaan urusan keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta pelaporan Sistem Akuntansi Instansi, urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan dan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan, rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.

2. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengembangan, pelayanan jasa, dan pengoperasian

Terminal Tipe A, Terminal barang untuk umum, dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, Pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, serta bantuan teknis fasilitas pendukung dan integrasi moda dan Pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.

3. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan kalibrasi peralatan pengujian berkala dan pemeriksaan kesesuaian fisik rancang bangun kendaraan bermotor, pemeriksaan dan sertifikasi kelaiklautan kapal, analisis trayek angkutan jalan antar kota antar provinsi dan angkutan jalan yang disubsidi oleh pemerintah pusat, penetapan jadwal operasi, pemberian subsidi angkutan jalan dan pelayaran perintis sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis penyediaan sarana jalan, sungai, danau, dan penyeberangan.

4. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan

Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan untuk jaringan jalan nasional, penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan perlengkapan jalan, rambu sungai dan danau, sarana bantu navigasi pelayaran, dan sistem informasi manajemen lalu lintas sungai, danau, dan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi di kolam Pelabuhan penyeberangan dan alur sungai dan danau, pemberian rekomendasi laik fungsi jalan nasional non-tol, pemberian bantuan teknis perlengkapan jalan, halte dan rambu sungai danau, pengamatan dan pemantauan perusahaan angkutan jalan, kegiatan karoseri, penyelenggara pengujian berkala kendaraan bermotor, Pelabuhan dan penyelenggara Pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, kendaraan bermotor di jalan, tarif angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, pemberian subsidi angkutan jalan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemenuhan perlengkapan jalan, persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas, pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan, pemenuhan kelaiklautan kapal sungai, danau, dan penyeberangan, ketepatan waktu pelayanan, dan pemberian subsidi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, sarana bantu navigasi pelayaran sungai, danau, kegiatan pengerukan dan reklamasi di kolam Pelabuhan penyeberangan dan alur sungai danau, dan pemanfaatan bantuan teknis, pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran pada Pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-

undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, serta patroli dan pengamanan pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.1. Bagan Struktur Organisasi



I.3. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Pegawai di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II adalah sebanyak 324 orang dengan rincian 159 Orang PNS, 2 Orang PPPK dan 163 Orang PPNP dengan pembagian wilayah kerja sebagai berikut :

Tabel I. 1 Sumber Daya Manusia Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II

NO	UNIT KERJA	JUMLAH			TOTAL
		PNS	PPPK	PPNP	
1	KANTOR INDUK BPTD KELAS II JAMBI	46	1	31	78
2	TERMINAL TIPE A ALAM BARAJO KOTA JAMBI	16	0	24	40
3	TERMINAL TIPE A SRI BULAN KAB. SAROLANGUN	11	0	14	25
4	TERMINAL TIPE A PULAU TUJUH BANGKO KAB. MERANGIN	12	0	17	29
5	TERMINAL TIPE A MUARA BUNGO KAB. MUARA BUNGO	15	1	19	35
6	UPPKB JAMBI MERLUNG	15	0	25	40
7	UPPKB MUARA TEMBESI	19	0	17	36
8	UPPKB SAROLANGUN	12	0	10	22
9	UPPKB SUNGAI PENUH	0	0	1	1
10	PELABUHAN PENYEBERANGAN KUALA TUNGKAL	3	0	5	8
11	PELABUHAN SUNGAI PS. ANGSO DUO	4	0	0	4
12	PELABUHAN SUNGAI NIPAH PANJANG	3	0	0	3
13	PELABUHAN SUNGAI MENDAHARA	3	0	0	3
JUMLAH		159	2	163	324

I.4. POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

Untuk mencapai tujuan organisasi maka perlu disusun program kerja, melalui program kerja akan terlihat tahapan-tahapan yang dilakukan serta dukungan materi atau bahan lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Dalam penyusunan program kerja/ kegiatan ini ada beberapa persyaratan/ kriteria yang perlu dipenuhi. Beberapa kriteria tersebut antara lain:

- 1) Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- 2) Penataan dan pembinaan SDM transportasi darat;
- 3) Perencanaan anggaran dan proses pengadaan.

I.5. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Triwulan III ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Tugas Pokok dan Fungsi
 - I.2.1 Bagan Struktur Organisasi
- I.3 Sumber Daya Manusia
- I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- I.5 Sistematika Laporan
- I.6 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024
 - I.6.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024
- I.7. Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

- II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja
- II.2 Pengukuran Capaian Kinerja
 - II.2.1. SK.1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi
 - II.2.1.1 IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan
 - a.1) Definisi Indikator Kinerja
 - a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024

a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.1.2 IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi

a.1) Definisi Indikator Kinerja

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024

a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.1.3 IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi

a.1) Definisi Indikator Kinerja

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024

a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.2. SK. 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat

II.2.2.1 IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A

a.1) Definisi Indikator Kinerja

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024

a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.2.2 IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

a.1) Definisi Indikator Kinerja

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024

a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.3. SK. 4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat

II.2.3.1 IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.3.2 IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.3.3 IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.3.4 IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.3.5 IKK 7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.4 SK. 5 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

II.2.4.1 IKK 5.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.5 SK. 1 Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

II.2.5.1 IKK 1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3 Realisasi Anggaran

II.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2024

- 1. Pagu Anggaran
 - a. Rincian Per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2024
 - b. Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2024
 - c. Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran
- 2. Refocusing Anggaran Tahun 2024
 - a. Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2024
 - b. Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2024
 - c. Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2024
 - d. Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024
- 3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020 - 2024

II.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2023

- 1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024
- 2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024
- 3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024
- 4. Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

II.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan
2. Hambatan dan Kendala

BAB III PENUTUP

III.1 Penutup

III.1.1 Ringkasan Capaian

III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
3. Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
4. Rencana Aksi Tahun 2024;
5. Revisi I Rencana Aksi Tahun 2024;
6. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2024;
7. Lain-lain yang dianggap perlu.

1.6. Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi saat ini telah mengacu dan menggunakan Revisi Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi dikarenakan adanya Revisi Rencana Strategis dengan Nomenklatur terbaru di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan perubahan pada target Indikator Kinerja Kegiatan pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi.

Revisi Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program BPTD Kelas II Jambi dalam kurun waktu 2020 – 2024 sebagai masukan dalam penyusunan Draft Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 - 2024 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Revisi Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020 - 2024, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel I.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020-2024 sesuai Revisi Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET S.D 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4	4
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7	4
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	80	100
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100	100
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	50	100
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	2	0
		IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan Zoss, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	30	50
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang	Orang	500	2000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET S.D 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		keselamatan transportasi jalan			
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	50	80
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	50	1
SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80	90
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80	90

I.6.1 Uraian / Narasi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2024

Perencanaan kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan berdasarkan Indikator Kinerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ini ditetapkan rencana capaian kinerja Tahun 2024 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2024 terdiri atas Indikator Kinerja Kegiatan guna mencapai sasaran dengan target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel I.3 Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
2	SK2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100
3	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	1
		IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	10

		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1
4	SK5 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

I.7. Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sampai dengan Triwulan III mengacu pada Revisi I Perjanjian Kinerja. Revisi I Perjanjian Kinerja dilaksanakan dikarenakan adanya pergantian Direktur Jenderal Perhubungan Darat, pergantian Kepala Balai, perubahan target pada salah satu Indikator Kinerja Kegiatan dan revisi anggaran. Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi merupakan kontrak kinerja antara Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2024 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN.

Indikator kinerja kegiatan pada Revisi I Perjanjian Kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran sebesar Rp. 89.125.808.000,- adalah sebagai berikut:

Tabel I.4 Perjanjian Kinerja Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Jambi Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Indra Yanto

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. Hendro Sugiatno, M.M.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Jambi, 3 Januari 2024
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jambi

EKO INDRA YANTO
NIP. 19790220 200112 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
2	SK2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100
3	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	1
		IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	10
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1
4	SK5 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

KEGIATAN**ANGGARAN**

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 17.500.000.000
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 9.582.899.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 33.625.548.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 4.143.720.000
5. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp. 262.000.000
6. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 6.222.823.000
7. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 17.633.587.000

Disetujui
Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Jambi, 3 Januari 2024
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jambi



EKO INDRA YANTO
NIP. 19790220 200112 1 001

Tabel I.5 Revisi I Perjanjian Kinerja Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi
Jambi Tahun 2024



REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Drs. Benny Nurdin Yusuf, A.Md. LLAJ., M.H.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

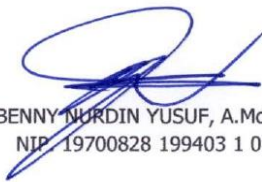
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Irjen Pol. RISYAPUDIN NURSIN, S.I.K
NRP. 66110433

Jambi, 1 Juli 2024
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jambi



Dr. Drs. BENNY NURDIN YUSUF, A.Md. LLAJ., M.H.
NIP. 19700828 199403 1 007

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
2	SK2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100
3	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	67
		IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	10
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1
4	SK5 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

KEGIATAN**ANGGARAN**

1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 17.500.000.000
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 9.582.899.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 33.625.548.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 4.143.720.000
5.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp. 262.000.000
6.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 6.222.823.000
7.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 17.788.818.000

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Irjen Pol. RISYAPUDIN NURSIN, S.I.K
NRP. 66110433

Jambi, 1 Juli 2024
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jambi

Dr. Drs. BENNY NURDIN YUSUF, A.Md. LLAJ., M.H.
NIP. 19700828 199403 1 007

BAB II

Akuntabilitas Kinerja

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

II.1. Tahapan Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan visi dan misinya. Mekanisme pengelolaan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi melalui aplikasi *E-performance* dimulai dari target-target yang telah ditetapkan dalam PK yang kemudian dilakukan pengukuran dan pelaporan, monitoring dan evaluasi secara berkala melalui aplikasi *E-performance* yang berbasis web. Pelaksanaan pengelolaan pengukuran kinerja dilakukan sepanjang tahun yang meliputi proses penginputan, validasi, dan pelaporan secara berkala setiap awal bulan.

II.2. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja. Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web *E-Performance* yang menyediakan fasilitas Inputting, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimasa mendatang.

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Prosentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

Prosentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2024

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024;
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 Dalam Revisi Renstra BPTD Kelas II Jambi Tahun 2020-2024.

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja BPTD Kelas II Jambi, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan. Bermuara pada terwujudnya 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai pada periode 2020-2024.

Tabel II. 1 Pengukuran Kinerja BPTD Kelas II Jambi Triwulan III Tahun 2024

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan			Satuan	Target	Q1			Q2			Q3		
					T	R	C	T	R	C	T	R	C
SK 1.	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi					75%			83%			90%	
IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	0	23,85	24%	100	50	50%	100	71	71%	
IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	
IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	
SK 2.	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat					49%			49%			49%	
IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95	95	68,51	72%	95	68,51	72%	95	68,51	72%	
IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100	100	25	25%	100	25	25%	100	25	25%	
SK 4.	Meningkatnya keselamatan transportasi darat					38%			40%			88%	
IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	100	4	4%	100	12	12%	100	51	51%	
IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	67	67	28	158%	67	28	158%	67	28	158%	
IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS. RASS dan batas kecepatan	Lokasi	10	10	0	0%	10	0	0%	10	0	0%	
IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500	1500	0	0%	1500	0	0%	1.500	2.269	151%	
IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80	80	54	68%	80	54	68%	80	54	68%	
IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1	1	0	0%	1	0	0%	1	1	100%	
SK 5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat					24%			58%			76,67%	
IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	90	22	24%	90	52	58%	90	69	76,67%	

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2024

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan				Q1			Q2			Q3		
				T	R	C	T	R	C	T	R	C
SK 1. Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel						33%			92%			93,67%
IKK1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	90	30	33%	90	83	92%	90	84,3	93,67%
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan						44%			67%			79,4%
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan						47%			62%			82%
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKK≥100%)						3			3			5
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% (0%≤IKK<100%)						10			10			8

Selama tahun 2024, ada 5 Sasaran Kegiatan (SK) dan di dalamnya ada 13 IKK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi. Penjelasan capaian IKK untuk setiap Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut:

2.2.1 Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi merupakan salah satu Unit Kerja di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam Revisi Renstra BPTD Kelas II Jambi Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan dan dilaksanakan memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan
2. IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi
3. IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi

IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan adalah perbandingan antara jumlah pelayanan angkutan perintis di jalan dengan jumlah pelayanan yang direncanakan.

Penyelenggaraan angkutan jalan perintis dilaksanakan berdasarkan jaringan trayek angkutan orang yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Capaian kinerja persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan dihitung berdasarkan jumlah trayek angkutan perintis yang dilayani.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK1.1 = \frac{\text{Jumlah RIT realisasi pada tahun (n)}}{\text{Jumlah RIT yang direncanakan}} \times 100\%$$

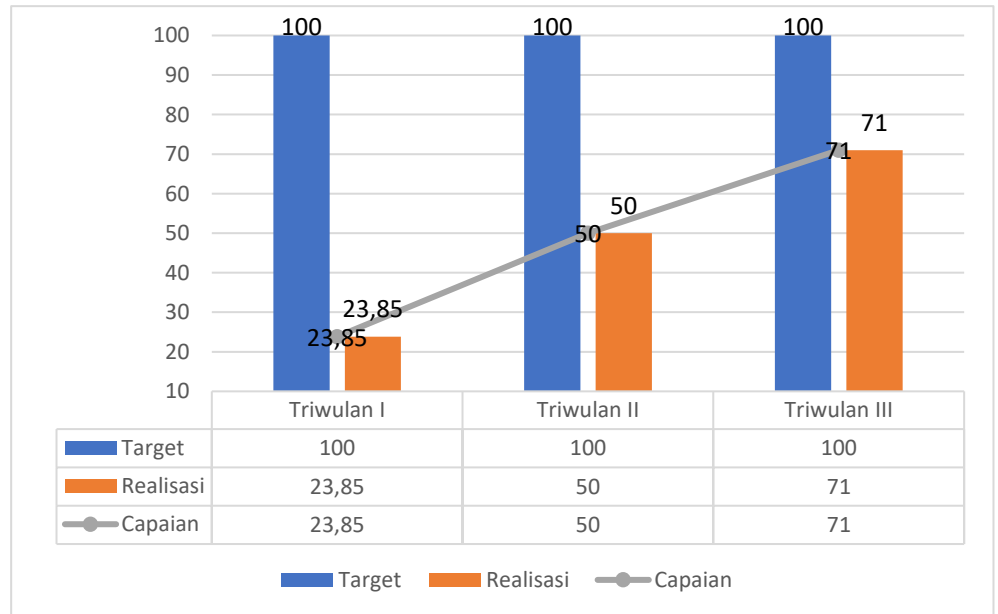
Keterangan:

Trayek yang dilayani adalah:

1. Desa Sungai Jernih – Terminal Tipe C Rimbo Bujang;
2. Desa Tanah Tumbuh – Sp. Niam – Terminal Muara Bulian;
3. Desa Bangun Seranten – Terminal Bungo;
4. Desa Belukar Panjang – Terminal Tipe A Muara Bungo;
5. Desa Sari Mulya – Terminal Tipe A Muara Bungo;
6. Desa Suo-Suo – Terminal Tipe C Rimbo Bujang;
7. Desa Pemayang – Terminal Tipe C Rimbo Bujang;
8. Desa Mekar Jaya – Terminal Muara Bulian – Terminal Alam Barajo Jambi.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Capaian Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2024 sebesar 71% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 71%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan dibawah ini:



Gambar II.1 Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 IKK Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 73 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Jalan Perintis;
3. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
4. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-DRJD 8317 Tahun 2023 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2024;
5. Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2024 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan memiliki target 100% yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dan target pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi.

c. Faktor-faktor keberhasilan:

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan sebagai berikut :

1. Dipengaruhi oleh komitmen antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi dan pemerintah daerah dalam kegiatan pengembangan dan peningkatan pelayanan keperintisan angkutan jalan.
2. Masih diperlukannya angkutan keperintisan di daerah yang belum terjangkau oleh angkutan umum.
3. Angkutan keperintisan menjadi salah satu pilihan transportasi yang murah.

d. Faktor-faktor kegagalan:

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan sebagai berikut :

1. Kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan perintis yang telah disediakan
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya angkutan keperintisan
3. Kurangnya SDM.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Realisasi Kinerja Indikator Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III mencapai 50%.

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja Indikator Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan pada Tahun 2024 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1.919}{2.688} \times 100\% = 71\%$$

Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan sampai dengan Triwulan III mencapai 71%.

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 4.803.741.000 Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 3.261.133.840.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Perencanaan yang komprehensif dalam menentukan rute / trayek angkutan perintis di Provinsi Jambi dengan memperhatikan RPJMN, Renstra, serta kebutuhan masyarakat terhadap layanan angkutan perintis di lapangan.
2. Komitmen antara Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam kegiatan peningkatan konektivitas transportasi darat terutama di daerah-daerah terisolir dan belum terlayani angkutan umum.
3. Dapat terus Mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam pelayanan jasa angkutan umum.
4. Meningkatkan kualitas layanan dari moda angkutan darat.
5. Dapat terus Mewujudkan pelayanan jasa angkutan yang handal.
6. Selalu Menciptakan rasa nyaman dan efisiensi terhadap pengguna jasa angkutan umum.
7. Dapat Mewujudkan konektivitas transportasi darat.

2.2.1.2. IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Terminal Tipe-A yang Beroperasi merupakan Terminal Tipe-A yang telah selesai dibangun dan telah beroperasi. Terminal Tipe-A adalah Terminal Tipe-A yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sedangkan Terminal Barang yang Beroperasi merupakan Terminal Barang yang telah selesai dibangun dan telah melayani Angkutan Barang di Jalan.

Indikator kinerja kegiatan tersebut merupakan kegiatan penyelenggaraan kelancaran operasional Terminal Tipe A dan memastikan tata Kelola sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan secara efisien dan efektif.

Terminal Tipe A yang beroperasi di Provinsi Jambi ada 4 Terminal diantaranya adalah:

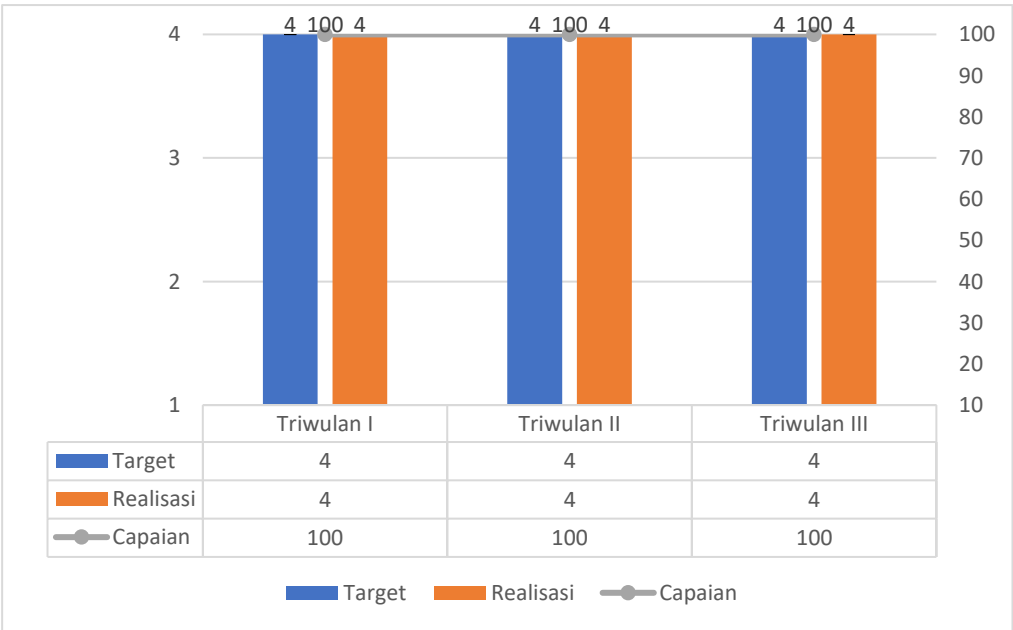
- 1. Terminal Tipe A Alam Barajo Kota Jambi;
- 2. Terminal Tipe A Sribulan Sarolangun;
- 3. Terminal Tipe A Pulau Tujuh Bangko Merangin;
- 4. Terminal Tipe A Muara Bungo.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi digunakan rumus sebagai berikut:

IKK 1.3 = Jumlah terminal tipe A dan terminal barang yang beroperasi

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Capaian Kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi Tahun 2024 sebesar 4 lokasi jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2024 sebesar 4 lokasi, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK.



Gambar II.2 Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 IKK Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
3. Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2024 Indikator Kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi memiliki target 100% yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dan target pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan persentase Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi sebagai berikut :

1. Tingginya antusias masyarakat menggunakan angkutan umum.
2. Informasi tentang pelayanan di terminal tersampaikan kepada masyarakat
3. Banyak masyarakat yang menggunakan terminal sebagai tempat perpindahan koridor.

d. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi sebagai berikut :

- Kurangnya sumber daya manusia;
- Tidak adanya anggaran operasional;
- Sarana dan prasarana yang tidak memadai.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Realisasi Kinerja Indikator Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III mencapai 4 lokasi.

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja Indikator Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

Persentase Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi sampai dengan Triwulan III mencapai 100%.

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp.8.233.829.000 Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III sebesar Rp. 5.694.902.304

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan kepada para penumpang;
2. Meningkatkan fasilitas para penumpang;
3. Melakukan pengawasan secara optimal terhadap transportasi jalan.

2.2.1.3. IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi**a.1) Definisi Indikator Kinerja**

Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan penyeberangan. Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan penyeberangan Kelas I, Kelas II, dan Kelas III. Sedangkan Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan Sungai, Danau, Waduk, dan Terusan. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan pengumpul dan pengumpan. Pelabuhan SDP yang Beroperasi merupakan Pelabuhan SDP yang dibangun melalui APBN.

Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan di wilayah BPTD Kelas II Jambi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 yaitu:

1. Pelabuhan penyeberangan Kuala Tungkal;
2. Pelabuhan sungai Ps. Angso duo;
3. Pelabuhan sungai Nipah Panjang;

4. Pelabuhan sungai Mendahara.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi

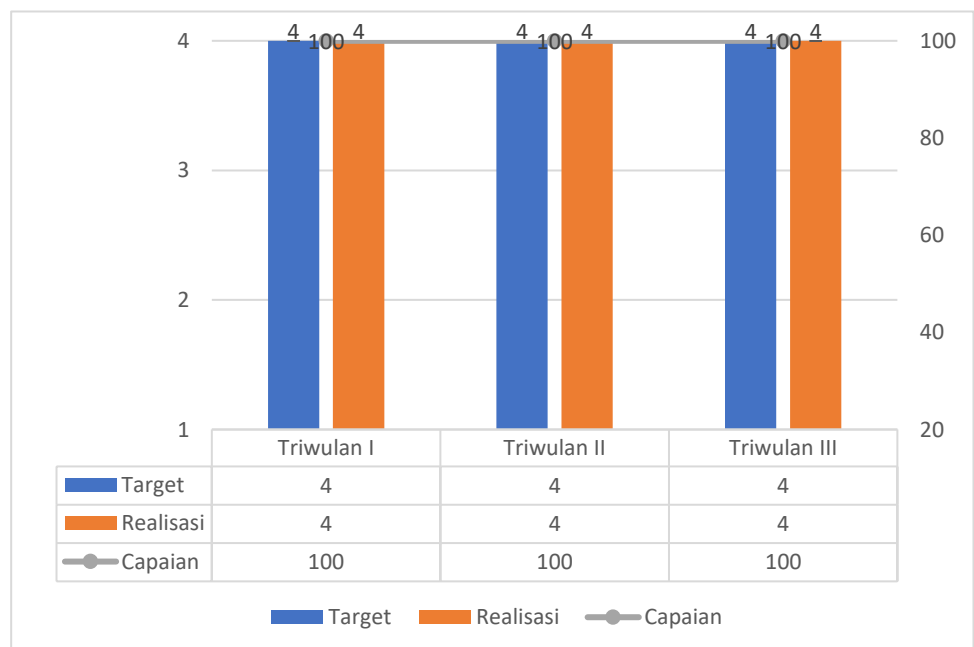
IKK 1.6 = Jumlah Pelabuhan SDP yang telah selesai dibangun dan dioperasikan s.d tahun (n)

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi memiliki target 4 Lokasi dengan capaian realisasi sebesar 4 Lokasi. 4 Lokasi Pelabuhan SDP yang beroperasi tersebut yaitu :

1. Pelabuhan sungai penyeberangan kuala tungkal;
2. Pelabuhan sungai Angso duo;
3. Pelabuhan sungai Mendahara tengah;
4. Pelabuhan sungai Nipah Panjang.

Capaian Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi Tahun 2024 sebesar 4 Lokasi jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 4 Lokasi, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK



Gambar II.3 Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
3. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
4. Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2024 Indikator Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi memiliki target 100% yang diperoleh dari capaian terhadap Perjanjian Kinerja di Tahun sebelumnya dan target pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi sebagai berikut :

1. Tersedianya anggaran;
2. Melakukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pelabuhan;
3. Pengawasan operasional Pelabuhan;
4. Petugas yang kompeten dibidangnya;
5. Koordinasi yang selalu terjalin dengan stakeholder terkait;
6. Selalu melaksanakan evaluasi kerja.

d. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi sebagai berikut :

1. Tidak adanya anggaran;
2. Minimnya pelaksanaan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pelabuhan;
3. Tidak optimalnya pengawasan operasional pelabuhan.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Realisasi Kinerja Indikator Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III mencapai 4 lokasi.

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja Indikator Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

Persentase Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi sampai dengan Triwulan III mencapai 100%.

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 1.349.070.000 Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III sebesar Rp. 669.599.391.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan;
2. Melakukan pengawasan secara periodik;
3. Melakukan pembangunan prasarana pelabuhan berdasarkan rencana induk Pelabuhan yang telah disusun.
4. Terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di sungai danau dan penyeberangan;
5. Menjamin kesesuaian spesifikasi teknis fisik kendaraan;
6. Peningkatan keamanan dan ketertiban pelabuhan SDP.

2.2.2. Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi**Darat**

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi merupakan salah satu Unit Kerja di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam Revisi Renstra BPTD Kelas II Jambi Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan dan dilaksanakan memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada

kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2 diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A;
2. IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP.

2.2.2.1. IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Berdasarkan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, Standar Pelayanan terminal penumpang mencakup (1) pelayanan keselamatan, (2) pelayanan keamanan, (3) pelayanan kehandalan/keteraturan, (4) pelayanan kenyamanan, (5) pelayanan kemudahan/keterjangkauan, dan (6) pelayanan kesetaraan.

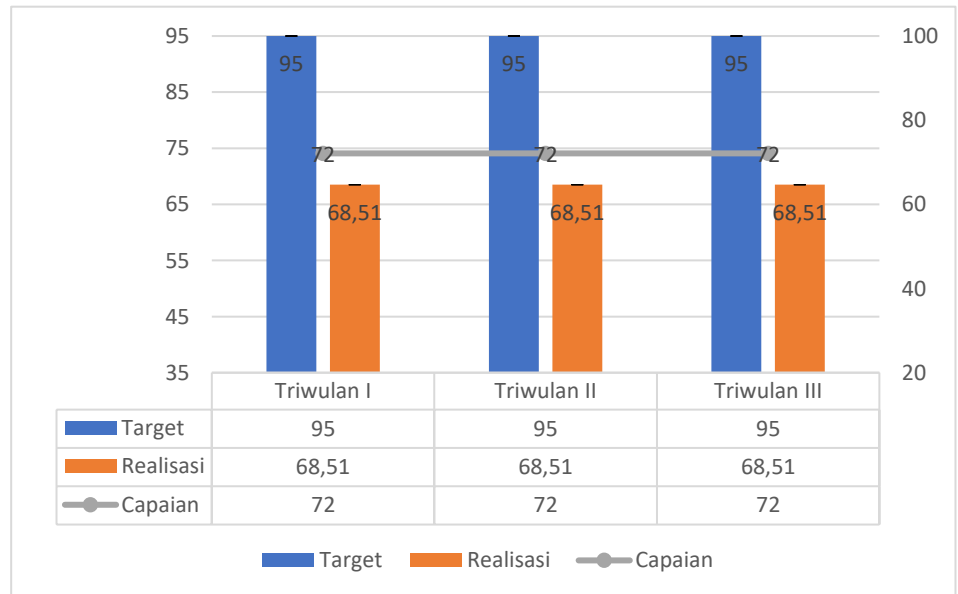
Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A dihitung pada Terminal Tipe-A yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Untuk menghitung indikator kinerja kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK2.1 = \frac{\text{Jumlah Nilai Indikator Jenis Pelayanan Terminal Tipe A yang memenuhi SP}}{\text{Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (SP)}} \times 100\%$$

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Capaian Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2024 sebesar 68,51% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 95%, maka capaian kinerja mencapai 72%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK



Gambar II.4 Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A

a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.4951/AJ.002/DRJD/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksana Kebersihan, Ketertiban, dan Kenyamanan Terminal Penumpang Tipe A;
4. Renstra BPTD Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2024 target perjanjian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal tipe-A memiliki target 95%.

c. Faktor-faktor Keberhasilan:

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal tipe-A:

1. Sumber daya manusia yang mencukupi, terampil, dan berintegritas;
2. Komitmen Petugas dalam Pelayanan yang ada di Terminal Tipe-A;
3. Fasilitas yang ada dapat memenuhi kebutuhan masyarakat;
4. Terpenuhiya Keamanan, Kebersihan, Ketertiban yang ada di Terminal.

d. Faktor-faktor Keberhasilan:

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal tipe-A sebagai berikut :

1. Kurangnya sumber daya manusia;
2. Tidak adanya anggaran operasional;
3. Sarana dan prasarana yang tidak memadai.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Realisasi Kinerja Indikator Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal tipe-A pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III sebesar 68,51%.

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja Indikator Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal tipe-A pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{68,51}{95} \times 100\% = 72\%$$

Persentase Jumlah Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal tipe-A sampai dengan Triwulan II mencapai 72%.

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal tipe-A pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp.8.233.829.000 Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III sebesar Rp. 5.694.902.304.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan kepada para penumpang;
2. Meningkatkan fasilitas para penumpang;
3. Melakukan pengawasan secara optimal terhadap transportasi jalan;
4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan SPM di Terminal Tipe-A.

2.2.2.2. IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP saat ini diukur hanya pada 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan atau 14 Pelabuhan Penyeberangan yang melayani, diantaranya: Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, Pelabuhan Penyeberangan Padangbai, Pelabuhan Penyeberangan Lembar, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-API, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kelian, Pelabuhan Penyeberangan Kayangan, Pelabuhan Penyeberangan Pototano, Pelabuhan Penyeberangan Bajoe, Pelabuhan Penyeberangan Kolaka, Pelabuhan Penyeberangan Kariangau, Pelabuhan Penyeberangan Penajam. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelabuhan Penyeberangan diatur melalui PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan Penyeberangan.

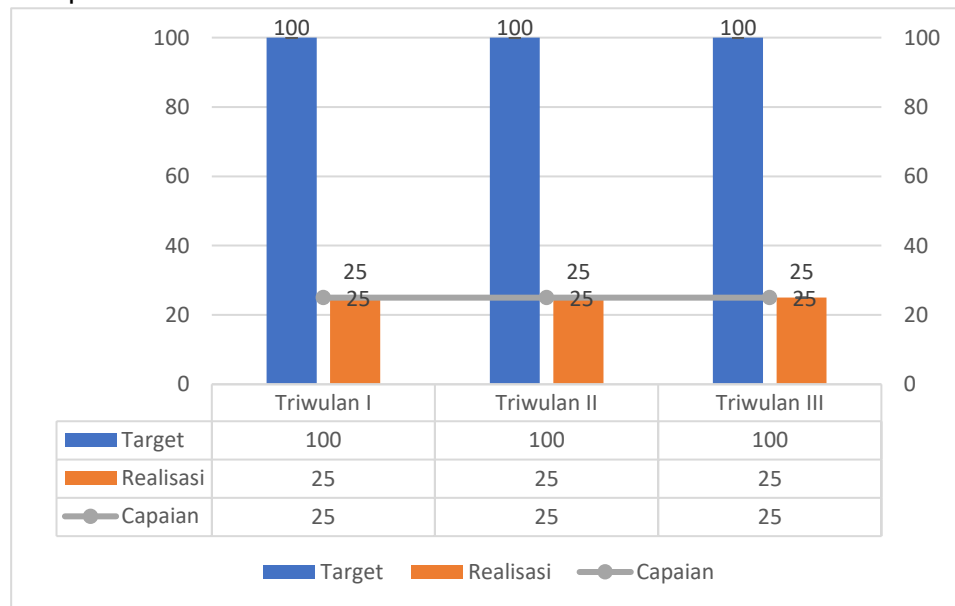
Selanjutnya, diperluas tidak hanya 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan, melainkan pelabuhan penyeberangan yang dikelola oleh Ditjen Perhubungan Darat dengan cara melibatkan BPTD dalam pemantauan SPM.

Untuk menghitung indikator kinerja kegiatan Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK2.3 = \frac{\text{jumlah pelabuhan yang memenuhi SPM}}{\text{jumlah pelabuhan yang dipantau}} \times 100\%$$

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Capaian Kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2024 sebesar 25% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 100%, maka capaian kinerja mencapai 25%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK



Gambar II.5 Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 IKK Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
4. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
5. Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2024 target perjanjian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP memiliki target 100%.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP sebagai berikut :

1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
2. Kualitas SDM;
3. Pelaksanaan pengawasan secara periodik.

d. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana tidak memadai
2. Kurangnya SDM;
3. Tidak optimalnya pelaksanaan pengawasan.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Realisasi Kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III sebesar 25%.

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja Indikator Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{25}{100} \times 100\% = 24\%$$

Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP sampai dengan Triwulan III mencapai 25%.

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 903.946.000. Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III sebesar Rp. 485.660.719.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Melakukan pengawasan secara periodik terhadap SPM di Pelabuhan SDP di Provinsi Jambi;
2. Melakukan sosialisasi terhadap perusahaan angkutan penyeberangan terkait SPM pelayanan angkutan penyeberangan;
3. Memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan angkutan penyeberangan yang melanggar ketentuan yang ada.

2.2.3. Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi merupakan salah satu Unit Kerja di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam Revisi Renstra BPTD Kelas II Jambi Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan dan dilaksanakan memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 diukur melalui 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal;
2. IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat;
3. IKK 3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan;
4. IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan;
5. IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor;
6. IKK 7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayanan SDP.

2.2.3.1. IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Kebutuhan Perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Jalan merupakan perhitungan dari 9 (sembilan) item Perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda. Adapun 9 (sembilan) item dimaksud meliputi:

- 1) Marka Jalan;
- 2) Rambu Lalu Lintas;
- 3) Patok Lalu Lintas;
- 4) Paku Jalan;
- 5) Pagar Pengaman Jalan;
- 6) Alat Penerangan Jalan;
- 7) Lampu Peringatan Pemakai Jalan;
- 8) Alat Pemberi Isyarat lalu lintas;
- 9) Cermin Tikungan.

BPTD Kelas II Jambi memiliki tugas dan fungsi untuk menginventaris kebutuhan infrastruktur keselamatan jalan, membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan jalan, serta melakukan monitoring terhadap fasilitas jalan yang telah terpasang sesuai kondisi ideal. Pada indikator Kinerja kegiatan Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terdapat beberapa kegiatan yaitu :

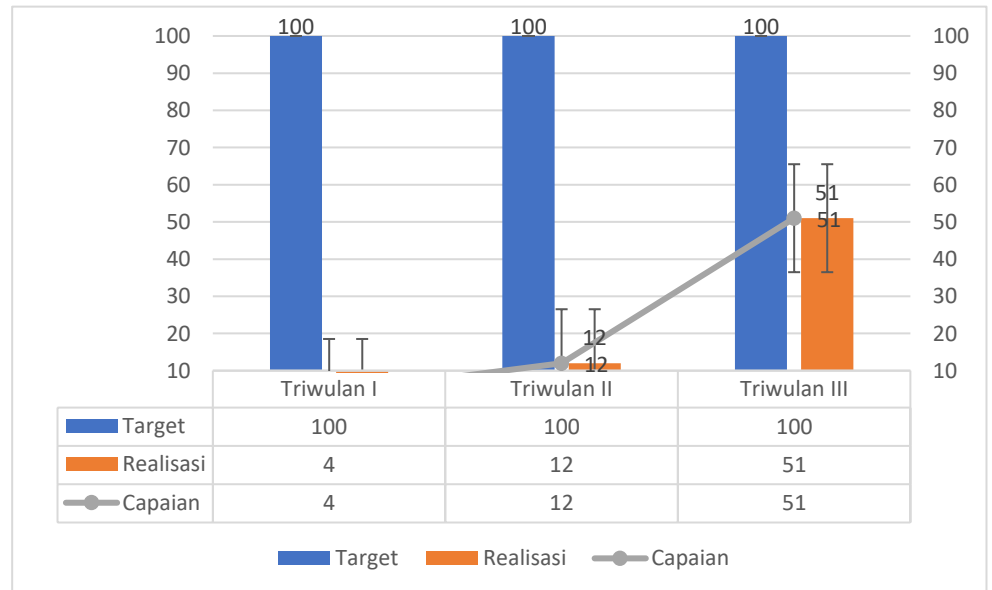
1. Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan (Prioritas Nasional);
2. Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional);
3. Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) (Prioritas Nasional);

Untuk menghitung indikator kinerja kegiatan Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK3.1 = \frac{\text{jumlah perlengkapan jalan yang terpasang}}{\text{jumlah kebutuhan perlengkapan jalan}} \times 100\%$$

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Capaian Kinerja Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal Tahun 2024 sebesar 51% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 100%, maka capaian kinerja mencapai 51%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK



Gambar II.6 Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 IKK Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. UU UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan
4. Revisi Renstra BPTD Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2024 target perjanjian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal memiliki target 100%.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal sebagai berikut :

1. Tersedianya anggaran;
2. Pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu;
3. Optimalnya pengawasan pembangunan.

d. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal sebagai berikut :

- Tidak adanya anggaran;
- Pelaksanaan pembangunan tidak tepat waktu;
- Kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Realisasi Kinerja Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III sebesar 51%.

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja Indikator Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{126.305}{247.586} \times 100\% = 51\%$$

Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal sampai dengan Triwulan III mencapai 51%. Target jumlah Kebutuhan perlengkapan jalan yang semula berjumlah 77.844 M1/unit/lokasi menjadi 247.586 M1/unit/lokasi dikarenakan adanya penambahan anggaran pada kegiatan tersebut sebesar Rp. 18.000.000.000.

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada Tahun 2024 yaitu Rp. 40.361.814.000 Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III sebesar Rp. 21.357.425.050.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas perlengkapan jalan yang rusak;
2. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam upaya untuk bersama-sama menjaga fasilitas perlengkapan jalan yang sudah terpasang;
3. Berusaha melaksanakan pembangunan yang tepat waktu.

2.2.3.2. IKK 3.2 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Persentase jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran di UPPKB dibanding jumlah kendaraan angkutan barang yang masuk UPPKB. Pelanggaran yang dimaksud adalah indikasi pelanggaran yang tercatat dalam UPPKB atau melalui aplikasi JTO.

Pada IKK tersebut Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor disebut UPPKB adalah unit kerja di bawah Kementerian Perhubungan yang melaksanakan tugas pengawasan muatan barang dengan menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada setiap lokasi tertentu, dan juga meminimalisir pelanggaran Over Dimensi dan Over Load. BPTD Kelas II Jambi memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan muatan angkutan barang dan penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor dengan Fasilitas Penimbangan yang dilaksanakan oleh Satpel UPPKB untuk pencatatan, pengawasan, dan penindakan Angkutan Barang terhadap:

1. Tata cara pemuatan barang;
2. Dimensi kendaraan Angkutan Barang;

3. Tekanan seluruh sumbu dan/atau setiap sumbu kendaraan Angkutan Barang;
4. Dokumen Angkutan Barang;
5. Kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa; dan
6. Jenis barang yang diangkut, berat angkutan dan asal tujuan.

Untuk menghitung indikator kinerja kegiatan Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat digunakan rumus sebagai berikut:

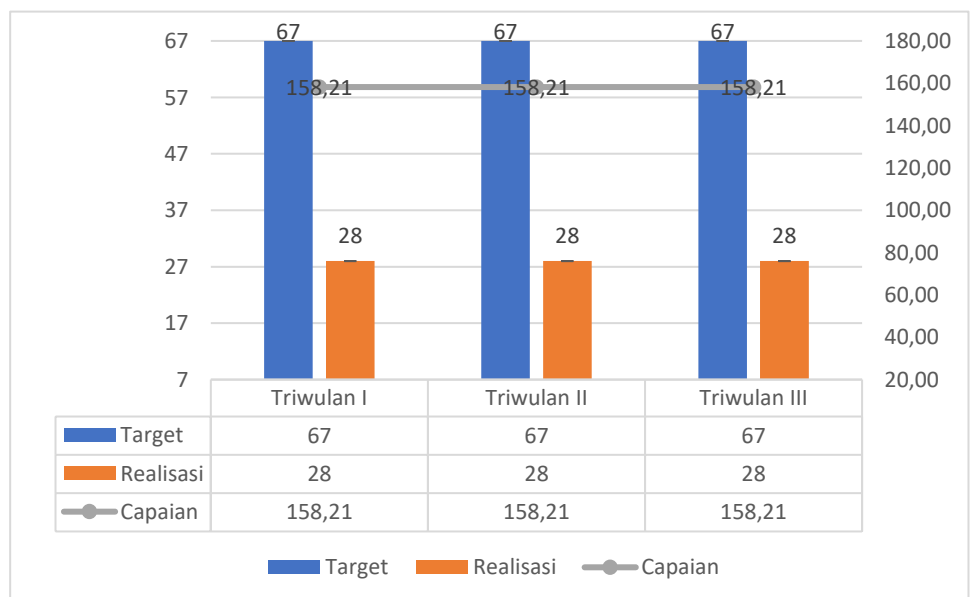
$$IKK\ 3.2 = \frac{\text{Jumlah kendaraan barang yang melakukan pelanggaran}}{\text{Jumlah kendaraan yang masuk pada UPPKB}} \times 100\%$$

Dan menggunakan rumus perhitungan capaian sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Capaian Kinerja Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2024 sebesar 28% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 67%, maka capaian kinerja mencapai 158%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik capaian IKK



Gambar II.7 Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 IKK Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
3. Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2024 target perjanjian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memiliki target 1%. Pada revisi I Perjanjian Kinerja Kepala Balai terdapat perubahan target pada IKK tersebut dikarenakan sulitnya untuk mencapai target semula sebesar 1%, dari data capaian IKK tersebut persentase jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran di UPPKB masih didapatkan jumlah pelanggaran yang cukup besar sehingga target semula 1% menjadi 67%.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai berikut :

1. Patuhnya pemilik kendaraan barang terhadap aturan yang berlaku;
2. Para sopir dan armada angkutan mematuhi segala peraturan yang berlaku dan bersedia menerima sanksi atas pelanggaran yang terjadi;
3. Sarana dan prasarana yang memadai.

d. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai berikut :

1. Tidak patuhnya pemilik kendaraan barang terhadap aturan yang berlaku;
2. Kurangnya SDM;
3. Sarana dan prasarana yang tidak memadai.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Realisasi Kinerja Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III sebesar 158,21%.

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja Indikator Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(67 - (28 - 67))}{67} \times 100\% = 158,21\%$$

Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sampai dengan Triwulan III mencapai 158,21%.

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 6.363.734.000 Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III sebesar Rp. 4.036.897.925.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Melakukan sosialisasi kepada para pengusaha/masyarakat terkait Over Dimensi Over Load (ODOL) kendaraan barang;
2. Memberikan sanksi tegas kepada sopir yang melanggar ketentuan Over Dimensi Over Load (ODOL);
3. Memperbaiki sarana dan prasarana yang masih kurang memadai.

2.2.3.3. IKK 3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Zona Selamat Sekolah (ZoSS) adalah bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa kegiatan pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah. Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) merupakan bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa penyediaan sarana dan prasarana angkutan dengan pengendalian lalu lintas dan penggunaan jaringan jalan serta penggunaan sarana dan prasarana angkutan sungai dan danau dari pemukiman menuju sekolah.

Batas Kecepatan adalah aturan yang sifatnya umum dan/atau khusus untuk membatasi kecepatan yang lebih rendah karena alasan keramaian, disekitar sekolah, banyaknya kegiatan di sekitar jalan, penghematan energi ataupun karena alasan geometri jalan.

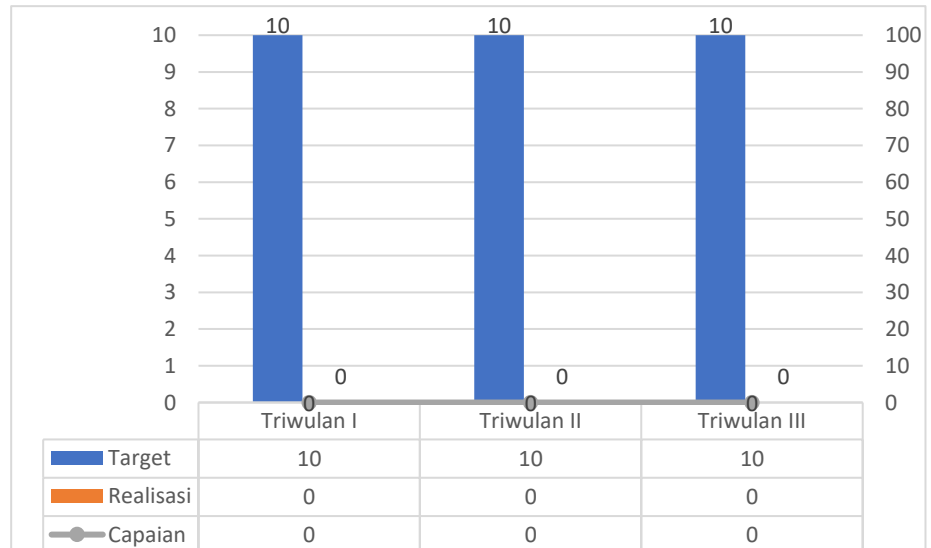
Jumlah fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan adalah jumlah fasilitas keselamatan yang telah terbangun di jalan nasional sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk menghitung indikator kinerja kegiatan jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK\ 3.3 = \text{Jumlah kumulatif fasilitas keselamatan yang sudah terbangun s.d tahun } (n)$$

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Capaian Kinerja jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan Tahun 2024 sebesar 0 lokasi, jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 10 lokasi, maka capaian kinerja mencapai 0%. IKK tersebut belum terdapat realisasi dikarenakan anggaran pada IKK tersebut terkena Automatic Adjustment. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik capaian IKK



Gambar II.8 Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 IKK Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 16 Tahun 2016 tentang Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS);
3. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.3582/AJ.403/DRJD/2018 tentang Pedoman Teknis Pemberian Prioritas Keselamatan dan Kenyamanan Pejalan Kaki pada Kawasan Sekolah melalui Penyediaan Zona Selamat Sekolah;
4. Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2024 target perjanjian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan memiliki target 10 lokasi.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan sebagai berikut :

1. Tersedianya anggaran untuk kegiatan tersebut;
2. Pembangunan tepat waktu;
3. Pembangunan yang tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.

d. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan sebagai berikut :

1. Anggaran terkena Automatic Adjustment;
2. Pembangunan tidak tepat waktu;
3. Pembangunan yang tidak tepat sasaran.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Realisasi Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III sebesar 0 lokasi dikarenakan kegiatan tersebut terkena Automatic Adjustment.

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja Indikator Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0}{10} \times 100\% = 0\%$$

Realisasi capaian indikator kegiatan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS sampai dengan Triwulan III mencapai 0%.

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 2.750.000.000 belum ada realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III dikarenakan kegiatan tersebut terkena *Automatic Adjustment*.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Melakukan pemasangan ZoSS untuk sekolah yang ada di tepi jalan akan menjadi pengingat bagi pengendara agar lebih waspada;
2. Mengalokasi anggaran untuk pemeliharaan area ZoSS;

3. Evaluasi Penerapan ZoSS.

2.2.3.4 IKK 3.5 Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi. Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan di Balai Pengelola Transportasi Darat.

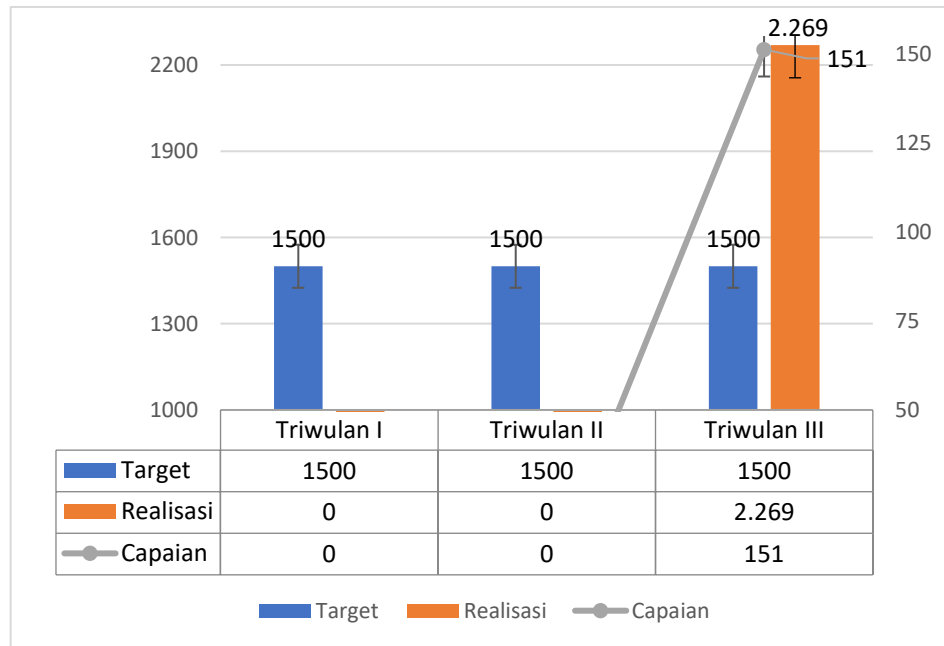
Jumlah masyarakat dihitung berdasarkan laporan pelaksanaan disetiap Balai Pengelola Transportasi Darat. Kegiatan pada IKK tersebut untuk mengkampanyekan keselamatan dalam berlalu lintas kepada masyarakat.

Untuk menghitung indikator kinerja kegiatan Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK3.5 = \text{Jumlah kumulatif masyarakat yang mendapat sosialisasi pada PNKJ}$$

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Capaian Kinerja Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Tahun 2024 terealisasi sebesar 2.269 Orang jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 1.500 orang maka capaian kinerja mencapai 151%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK



Gambar II.9 Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
3. Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2024 target perjanjian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan memiliki target 1.500 orang.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sosialisasi keselamatan kepada masyarakat secara kontinyu dan terus menerus;

2. Adanya koordinasi dan komitmen antara instansi pemerintah terkait dengan masyarakat terkait keselamatan lalu lintas;
3. Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

d. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan sebagai berikut :

- Tidak adanya sosialisasi keselamatan;
- Tidak adanya koordinasi dan komitmen antara pemerintah instansi terkait dan masyarakat terkait keselamatan lalu lintas;
- Kurangnya SDM.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Realisasi Kinerja Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III sebesar 2.269 orang.

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja Indikator Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{2.269}{1.500} \times 100\% = 151\%$$

Realisasi capaian indikator kegiatan Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan sampai dengan Triwulan III mencapai 151%.

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 350.000.000 dan belum ada realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Melakukan edukasi kesadaran tertib berlalu lintas;
2. Melakukan koordinasi dan komitmen antara pemerintah instansi terkait dan masyarakat terkait keselamatan lalu lintas.

2.2.3.6 IKK 7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pemberian akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) sesuai dengan Perdirjen Nomor KP.4404/AJ.502/DRJD/2020.

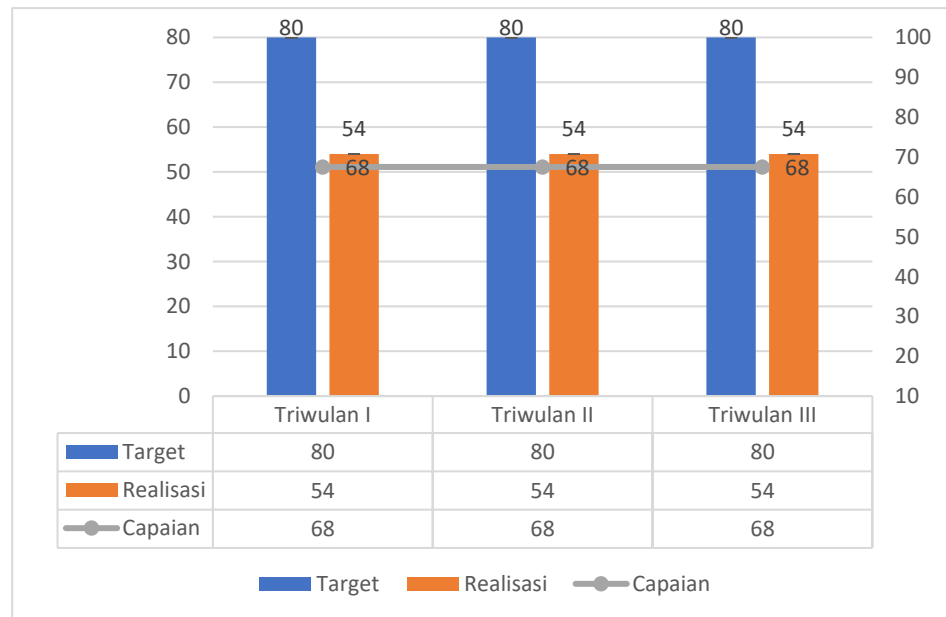
Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan persentase jumlah kumulatif Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang telah terakreditasi baik milik pemerintah daerah maupun swasta sampai dengan tahun ke (n) dibandingkan dengan jumlah Pemerintah Daerah Indonesia dan jumlah Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) milik swasta. Pemerintah daerah yang dimaksud adalah Seluruh Pemerintah Kota, dan Seluruh Pemerintah Kabupaten.

Untuk menghitung indikator kinerja kegiatan Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK\ 7a = \frac{\text{Jumlah UPUBKB Pemda dan Swasta (APM) yang lulus akreditasi sampai dengan tahun } n}{\text{Jumlah Pemda (Kota+Kab) + Jumlah UPUBKB Swasta (APM)}} \times 100\%$$

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Capaian Kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor Tahun 2024 sebesar 54%, jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2024 sebesar 80%, maka capaian kinerja mencapai 68%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK



Gambar II.10 Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK. 1471/aj.402/drjd/2017 Tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
4. Revisi Renstra BPTD Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2024 Indikator Kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor terhadap Keselamatan transportasi darat memiliki target 80%.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor sebagai berikut :

1. Permintaan dari Dishub Kab/ Kota;
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
3. Tersedianya SDM yang terampil dan memiliki kompetensi.

d. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor sebagai berikut :

- Tidak adanya anggaran;
- Sarana dan prasarana yang tidak memadai;
- Kurangnya SDM.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Realisasi Kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III sebesar 54%.

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja Indikator Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{54}{80} \times 100\% = 68\%$$

Realisasi capaian indikator kegiatan Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor sampai dengan Triwulan III mencapai 68%.

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Penganggaran Indikator Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor berdasarkan Nomenklatur di POK yaitu sebesar Rp. 185.074.000,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 120.025.268.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor;
2. Meningkatkan SDM penguji kendaraan bermotor;
3. Memperbaiki sarana dan prasarana yang belum memadai.

2.2.3.7 IKK 7b Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Berdasarkan PM 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau, alur pelayaran adalah perairan sungai dan danau, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antara muara sungai yang merupakan satu kesatuan alur-pelayaran sungai dan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

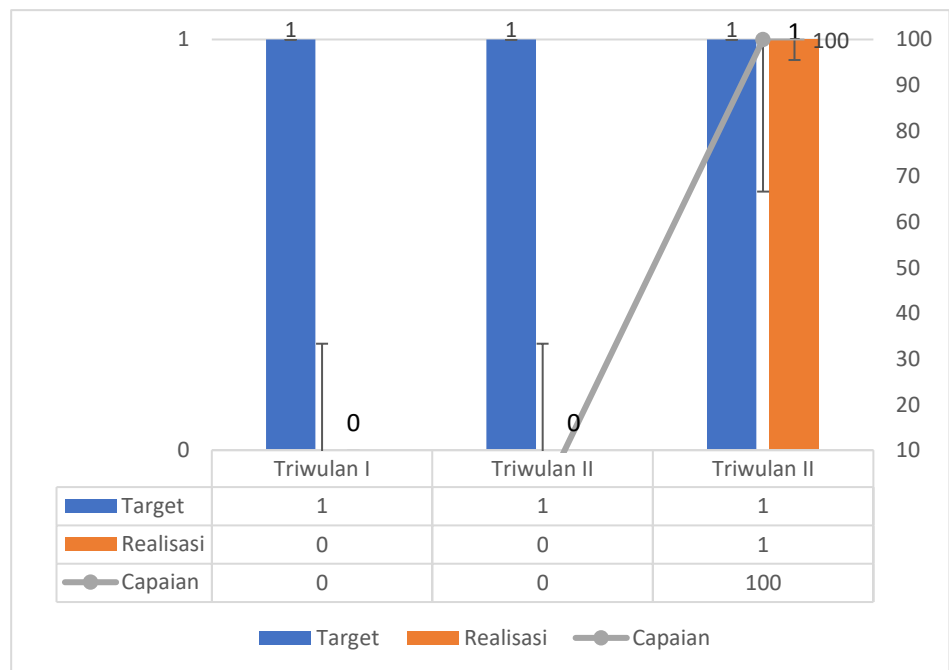
Alur pelayaran sungai dan danau ditetapkan melalui SK Menteri Perhubungan.

Untuk menghitung indikator kinerja kegiatan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK\ 7b = \text{Jumlah fasilitas keselamatan yang terbangun s.d tahun } (n)$$

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Capaian Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP Tahun 2024 sebesar 1 Lokasi, jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 1 lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK



Gambar II.11 Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau;
3. Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2024 Indikator Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP memiliki target 1 lokasi.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP sebagai berikut :

1. Kondisi lapangan yang mendukung, seperti cuaca
2. Kontrak pekerjaan tepat waktu

3. Kesesuaian dengan kebutuhan

d. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP sebagai berikut :

1. Tidak adanya anggaran;
2. Pekerjaan tidak selesai dengan waktu yang telah ditentukan;
3. Perkiraan Tidak sesuai dengan kebutuhan.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Realisasi Kinerja Kegiatan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III sebesar 1 lokasi.

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja Indikator Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi capaian indikator kegiatan ersentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor sampai dengan Triwulan III mencapai 100%.

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Pagu Anggaran Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP berdasarkan Nomenklatur di POK yaitu sebesar Rp. 1.800.000.000,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III sebesar Rp. 1.794.780.641.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan SDP;
2. Mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalulintas dan angkutan SDP serta memberikan kemudahan bagi pengguna SDP dalam berlalu lintas;
3. Mewujudkan perairan yang berkeselamatan;

4. Menginventarisasi kembali jumlah rambu sungai yang akan dipasang;
5. Memasang rambu sungai di daerah yang belum terpasang.

2.2.4. Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

2.2.4.1. IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:

- a. Aspek Perencanaan;
- b. Aspek Kepegawaian (SDM);
- c. Aspek Keuangan;
- d. Aspek Penyelenggaraan Perkantoran (Umum).

Aspek perencanaan dimulai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Penginputan Aplikasi e-Performance.

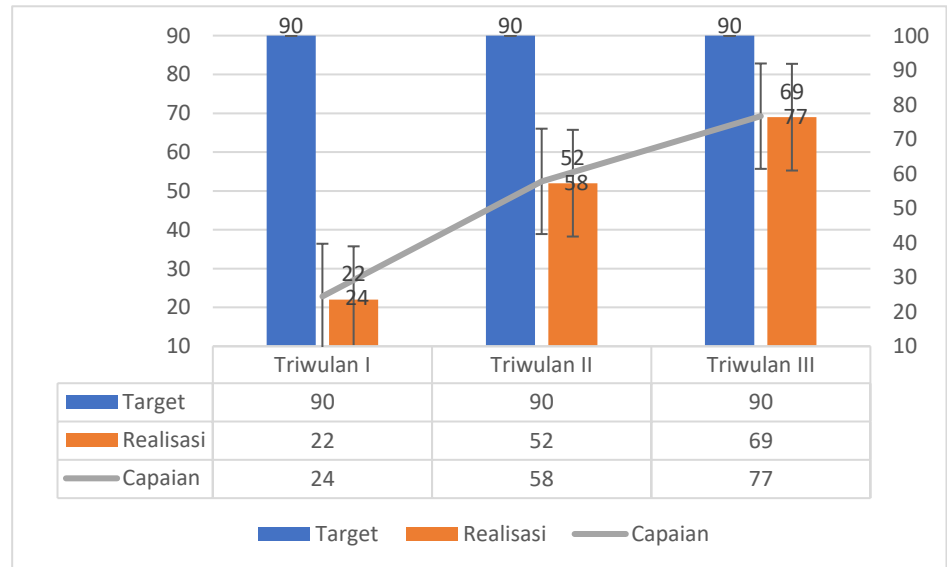
Aspek Kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja dan disiplin.

Aspek Keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja.

Aspek Penyelenggaraan Perkantoran dinilai berdasarkan hasil survei indeks kepuasan pegawai satuan kerja terhadap penyelenggaraan perkantoran.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Capaian Kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2024 nilai sebesar 69, jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 nilai sebesar 90, maka capaian kinerja mencapai 76,67%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK



Gambar II.12 Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
2. Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2024 Indikator Kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat memiliki target Nilai sebesar 90.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat sebagai berikut :

1. SDM yang cukup dan berkualitas;
2. Sarana dan prasarana yang memadai;
3. Tersedianya anggaran.

d. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat sebagai berikut :

1. Tidak adanya anggaran;
2. Sarana dan prasarana yang tidak memadai;
3. Kurangnya SDM.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Realisasi Kinerja Kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III nilai sebesar 69.

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja Indikator Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

Tabel II.1 Pengukuran Kinerja Indikator kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

No	Uraian	Bobot	Nilai
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan	25%	15%
1	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	10%	0%
2	Perjanjian Kinerja	5%	5%
3	pengisian input e-planning	5%	5%
4	pengisian input e-performance	5%	5%
B	Indeks Profesionalisme ASN	25%	18%
1	Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)	6%	6%
2	Kompetensi	10%	5%
3	Kinerja	8%	6%
4	Disiplin	1%	1%
C	Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja	25%	15,8%
D	Indeks Kepuasan Pegawai Penyelenggaraan Perkantoran	25%	20%
Total Nilai		100%	69%

$$\% \text{ Capaian} = \frac{69}{90} \times 100\% = 77\%$$

Realisasi capaian indikator Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat sampai dengan Triwulan III mencapai 77%.

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Pagu Anggaran Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat berdasarkan Nomenklatur di POK yaitu sebesar

Rp. 4.143.720.000,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III sebesar Rp. 2.776.075.663.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Melaksanakan tugas dan fungsi BPTD Kelas II Jambi secara optimal;
2. Memperbaiki sarana dan prasarana yang belum memadai
3. Membentuk SDM yang berkualitas.

2.2.5. Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat dan Akuntabel

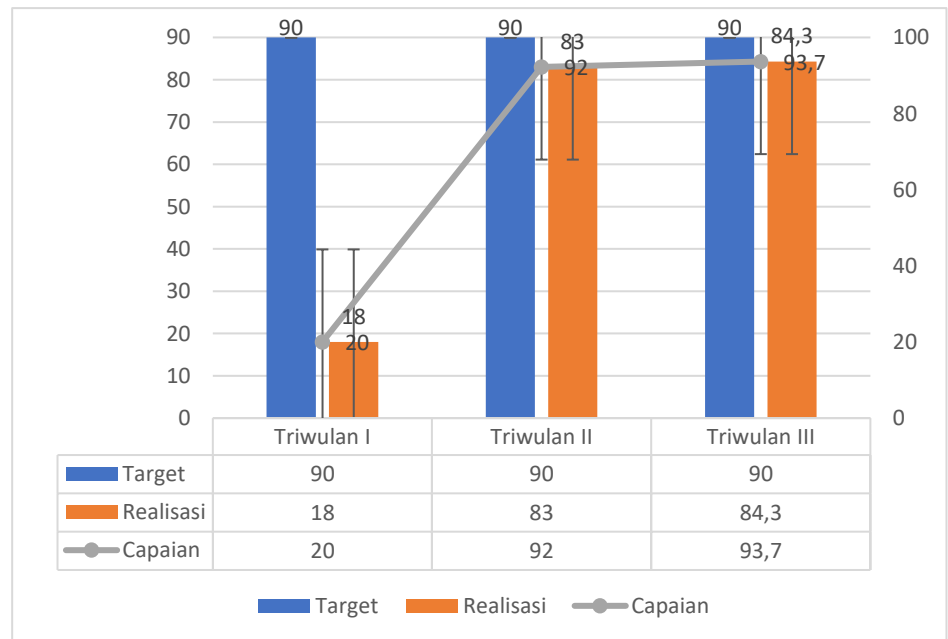
2.2.5.1. IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggara perkantoran dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai pada unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk mendukung kinerja sebagai bentuk pelayanan prima.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Capaian Kinerja Tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III Nilai sebesar 84,3, jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Nilai sebesar 90, maka capaian kinerja mencapai 93,67%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK



Gambar II.13 Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
2. Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2024 Indikator Kinerja Tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat memiliki target Nilai sebesar 90.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat sebagai berikut :

1. SDM yang cukup dan berkualitas;
2. Sarana dan prasarana yang memadai;
3. Tersedianya anggaran

d. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat sebagai berikut :

1. Tidak adanya anggaran;
2. Sarana dan prasarana yang tidak memadai;
3. Kurangnya SDM.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Realisasi Kinerja Kegiatan Tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III Nilai sebesar 84,3.

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja Indikator Tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

Tabel II.2 Pengukuran Kinerja Indikator kinerja Tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat

No	Uraian	Bobot	Nilai
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan	25%	25%
1	Tingkat kepuasan Pejabat Eselon III	15%	15%
2	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV	10%	10%
B	Tingkat Kepuasan Staf	25%	20%
C	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran	50%	39,3%
1	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x)	20%	20%
2	Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y)	15%	9,3%
3	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z)	15%	10%
Total Nilai		100%	84,3%

$$\% \text{ Capaian} = \frac{84,3}{90} \times 100\% = 93,67\%$$

Realisasi capaian indikator Tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat sampai dengan Triwulan III mencapai 93,67%.

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Pagu Anggaran Tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat berdasarkan Nomenklatur di POK yaitu sebesar Rp. 27.171.610.000,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III sebesar Rp. 22.172.240.577.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Meningkatkan layanan penyelenggaraan perkantoran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi.
2. Memperbaiki sarana dan prasarana yang belum memadai
3. Membentuk SDM yang berkualitas.

II.3. Realisasi Anggaran

II.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2024

1. Pagu Anggaran

a.1. Rincian Per Sumber Dana Tahun 2024 Per Triwulan III

Pagu Per Triwulan III DIPA TA. 2024 sebesar Rp. 89.125.808.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.3 Rincian per Sumber Dana pagu Tahun 2024 per Triwulan III

Sumber Dana	Pagu (Rp)
RM	107.561.095.000
PNBP	1.800.000.000
SBSN	-
Total	109.361.095.000

a.2. Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2024 Per Triwulan III

Tabel II.4 Rincian per Jenis Belanja Pagu Tahun 2024 per Triwulan III

Jenis Belanja	Pagu (Rp)
Belanja Pegawai	20.686.787.000
Belanja Barang	63.738.399.000
Belanja Modal	24.935.909.000
Total	109.361.095.000

a.3 Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran

Berikut uraian surat pengesahan revisi anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 :

1. Pagu Anggaran awal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-

- 022.03.2.403845/2024 tanggal 24 November 2023 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 88.970.577.000.
2. Revisi Ke-1 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2024 tanggal 17 Januari 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 88.970.577.000.
 3. Revisi Ke-2 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2024 tanggal 31 Januari 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 88.970.577.000.
 4. Revisi Ke-3 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2024 tanggal 19 Februari 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 88.970.577.000.
 5. Revisi Ke-4 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2024 tanggal 14 Maret 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 88.970.577.000.
 6. Revisi Ke-5 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2024 tanggal 18 April 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 88.970.577.000.
 7. Revisi Ke-6 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2024 tanggal 7 Mei 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 88.970.577.000.
 8. Revisi Ke-7 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2024 tanggal 29 Mei 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 88.970.577.000.
 9. Revisi Ke-8 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2024 tanggal 21 Juni 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 89.125.808.000.
 10. Revisi Ke-9 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-

022.03.2.403845/2024 tanggal 26 Juni 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 89.125.808.000.

11. Revisi Ke-10 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2024 tanggal 9 Juli 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 89.125.808.000.
12. Revisi Ke-11 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2024 tanggal 21 Agustus 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 106.463.126.000.
13. Revisi Ke-12 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2024 tanggal 30 Agustus 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 109.361.095.000.
14. Revisi Ke-13 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2024 tanggal 13 September 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 109.361.095.000.

2. Refocusing Anggaran Tahun 2024

a.1 Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2024 per Triwulan III

Tabel II.5 Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2024 per Triwulan III

Pagu	Sumber Dana			Jumlah
	RM	PNBP	SBSN	
Pagu Awal	87.170.577.000	1.800.000.000	-	88.970.577.000
Revisi Ke-1	87.170.577.000	1.800.000.000	-	88.970.577.000
Revisi Ke-2	87.170.577.000	1.800.000.000	-	88.970.577.000
Revisi Ke-3	87.170.577.000	1.800.000.000	-	88.970.577.000
Revisi Ke-4	87.170.577.000	1.800.000.000	-	88.970.577.000
Revisi Ke-5	87.170.577.000	1.800.000.000	-	88.970.577.000
Revisi Ke-6	87.170.577.000	1.800.000.000	-	88.970.577.000
Revisi Ke-7	87.170.577.000	1.800.000.000	-	88.970.577.000
Revisi Ke-8	87.325.808.000	1.800.000.000	-	89.125.808.000
Revisi Ke-9	87.325.808.000	1.800.000.000	-	89.125.808.000
Revisi Ke-10	87.325.808.000	1.800.000.000	-	89.125.808.000
Revisi Ke-11	104.663.126.000	1.800.000.000		106.463.126.000

Pagu	Sumber Dana			Jumlah
	RM	PNBP	SBSN	
Revisi Ke-12	107.561.095.000	1.800.000.000	-	109.361.095.000
Revisi Ke-13	107.561.095.000	1.800.000.000	-	109.361.095.000

a.2 Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2024 per Triwulan III**Tabel II.6** Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2024 per Triwulan III

Pagu	Jenis Belanja			Jumlah
	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	
Pagu Awal	17.633.587.000	52.881.081.000	18.455.909.000	88.970.577.000
Revisi Ke-1	17.633.587.000	52.881.081.000	18.455.909.000	88.970.577.000
Revisi Ke-2	17.633.587.000	52.881.081.000	18.455.909.000	88.970.577.000
Revisi Ke-3	17.633.587.000	52.881.081.000	18.455.909.000	88.970.577.000
Revisi Ke-4	17.633.587.000	52.881.081.000	18.455.909.000	88.970.577.000
Revisi Ke-5	17.633.587.000	52.881.081.000	18.455.909.000	88.970.577.000
Revisi Ke-6	17.633.587.000	52.881.081.000	18.455.909.000	88.970.577.000
Revisi Ke-7	17.633.587.000	52.881.081.000	18.455.909.000	88.970.577.000
Revisi Ke-8	17.788.818.000	52.881.081.000	18.455.909.000	89.125.808.000
Revisi Ke-9	17.788.818.000	52.881.081.000	18.455.909.000	89.125.808.000
Revisi Ke-10	17.788.818.000	52.881.081.000	18.455.909.000	89.125.808.000
Revisi Ke-11	17.788.818.000	64.260.399.000	24.413.909.000	106.463.126.000
Revisi Ke-12	20.686.787.000	63.738.399.000	24.935.909.000	109.361.095.000
Revisi Ke-13	20.686.787.000	63.738.399.000	24.935.909.000	109.361.095.000

a.3. Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2024 per Triwulan III**Tabel II.7** Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2024 per Triwulan III

Sumber Dana dan Jenis Belanja	Pagu awal	Perubahan	Pagu Per Triwulan I	Perubahan	Pagu Per Triwulan II	Perubahan	Pagu Per Triwulan III
Belanja Pegawai	17.633.587.000	-	17.633.587.000	155.231.000	17.788.818.000	2.897.969.000	20.686.787.000
RM	17.633.587.000	-	17.633.587.000	155.231.000	17.788.818.000	2.897.969.000	20.686.787.000
PNBP	-	-	-	-	-	-	-
SBSN	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Barang	52.881.081.000	-	52.881.081.000	-	52.881.081.000	10.857.318.000	63.738.399.000
RM	52.581.081.000	-	52.581.081.000	-	52.581.081.000	10.857.318.000	63.438.399.000
PNBP	300.000.000	-	300.000.000	-	300.000.000	-	300.000.000
SBSN	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Modal	18.455.909.000	-	18.455.909.000	-	18.455.909.000	6.480.000.000	24.935.909.000
RM	16.955.909.000	-	16.955.909.000	-	16.955.909.000	6.480.000.000	23.435.909.000
PNBP	1.500.000.000	-	1.500.000.000	-	1.500.000.000	-	1.500.000.000
SBSN	-	-	-	-	-	-	-

a.4. Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Per Kegiatan Tahun 2024 per Triwulan III**Tabel II.8** Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Per Kegiatan Tahun 2024 per Triwulan III

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU PER TRIWULAN I	PERUBAHAN	PAGU PER TRIWULAN II	PERUBAHAN	PAGU PER TRIWULAN III
GA	Program Infrastruktur Konektivitas	64.852.167.000	-	64.852.167.000	-	64.852.167.000	17.337.318.000	82.189.485.000
GA.4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	17.500.000.000	-	17.500.000.000	-	17.500.000.000	- 662.682.000	16.837.318.000
GA.4638	Pelayanan Transportasi Darat	9.582.899.000	-	9.582.899.000	-	9.582.899.000	-	9.582.899.000
GA.4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	33.625.548.000	-	33.625.548.000	-	33.625.548.000	18.000.000.000	51.625.548.000
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	4.143.720.000	-	4.143.720.000	-	4.143.720.000	-	4.143.720.000
WA	Program Dukungan Manajemen	24.118.410.000	-	24.118.410.000	155.231.000	24.273.641.000	2.897.969.000	27.171.610.000
WA.4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	262.000.000	-	262.000.000	-	262.000.000	-	262.000.000
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	6.222.823.000	-	6.222.823.000	-	6.222.823.000	-	6.222.823.000
WA.4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	17.633.587.000	-	17.633.587.000	155.231.000	17.788.818.000	2.897.969.000	20.686.787.000

3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020-2024

Berikut adalah rincian perbandingan pagu dan realisasi Tahun anggaran 2020-2024 sampai dengan Triwulan III:

Tabel II.9 Rincian perbandingan pagu dan realisasi Tahun anggaran 2020-2024 sampai dengan Triwulan III

No	Tahun	Pagu Awal (Rp)	Pagu Triwulan II (Rp)	Pagu Triwulan III (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2020	88.949.535.000	89.049.535.000	99.150.386.000	57.493.561.263	57,99%
2	2021	129.371.473.000	96.730.007.000	99.765.868.000	62.411.631.708	62,56%
3	2022	65.786.704.000	61.406.971.000	67.113.382.000	37.362.333.323	55,67%
4	2023	101.360.757.000	101.710.065.000	101.801.947.000	74.601.042.699	73,28%
5	2024	88.970.577.000	89.125.808.000	109.361.095.000	63.640.799.964	58,19%

II.3.2. Realisasi Anggaran Anggaran Tahun 2024

1. Realisasi Anggaran per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024

Berikut adalah rincian realisasi Anggaran per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III:

Tabel II.10 Rincian realisasi Anggaran per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN I	REALISASI PAGU PER TRIWULAN I	%	PAGU PER TRIWULAN II	REALISASI PAGU PER TRIWULAN II	%	PAGU PER TRIWULAN III	REALISASI PAGU PER TRIWULAN III	%
GA	Program Infrastruktur Konektivitas	64.852.167.000	64.852.167.000	5.666.885.551	8,74	64.852.167.000	23.402.443.655	36,09	82.189.485.000	42.916.544.512	52,22
GA.4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	17.500.000.000	17.500.000.000	1.200.934.500	6,86	17.500.000.000	5.657.347.915	32,33	16.837.318.000	10.562.796.560	62,73
GA.4638	Pelayanan Transportasi Darat	9.582.899.000	9.582.899.000	1.597.474.239	16,67	9.582.899.000	3.490.916.986	36,43	9.582.899.000	6.081.709.848	63,46
GA.4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	33.625.548.000	33.625.548.000	2.602.945.834	7,74	33.625.548.000	12.514.029.839	37,22	51.625.548.000	23.495.962.441	45,51
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	4.143.720.000	4.143.720.000	265.530.978	6,41	4.143.720.000	1.740.148.915	41,99	4.143.720.000	2.776.075.663	66,99
WA	Program Dukungan Manajemen	24.118.410.000	24.118.410.000	7.412.171.153	30,73	24.273.641.000	14.685.166.498	60,50	27.171.610.000	20.724.255.452	76,27

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2024

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN I	REALISASI PAGU PER TRIWULAN I	%	PAGU PER TRIWULAN II	REALISASI PAGU PER TRIWULAN II	%	PAGU PER TRIWULAN III	REALISASI PAGU PER TRIWULAN III	%
WA.4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	262.000.000	262.000.000	-	-	262.000.000	-	-	262.000.000	207.624.865	79,25
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	6.222.823.000	6.222.823.000	1.685.997.012	27,09	6.222.823.000	3.136.022.840	50,40	6.222.823.000	4.595.299.855	73,85
WA.4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	17.633.587.000	17.633.587.000	5.726.174.141	32,47	17.788.818.000	11.549.143.658	64,92	20.686.787.000	15.921.330.732	76,96

2. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2024

Berikut adalah rincian realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III:

Tabel II.11 Rincian realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Pagu	%
Belanja Pegawai	20.686.787.000	15.921.330.732	76,96
Belanja Barang	63.738.399.000	33.540.260.876	52,62
Belanja Modal	24.935.909.000	14.179.208.356	56,86
Total	109.361.095.000	63.640.799.964	58,19

3. Realisasi Anggaran per Sumber Dana Tahun 2024

Berikut adalah rincian realisasi Anggaran per Sumber Dana Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III:

Tabel II.12 Rincian realisasi Anggaran Sumber Dana Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Pagu	%
RM	107.561.095.000	61.846.019.323	57,50
PNBP	1.800.000.000	1.794.780.641	99,71
SBSN	-	-	-
Total	109.361.095.000	63.640.799.964	58,19

4. Analisis Dana Yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja

Berikut analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Keuangan untuk Triwulan III TA. 2024 terkait dana yang belum terserap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.13 Rincian Sisa Anggaran Per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Pagu	%
Belanja Pegawai	20.686.787.000	15.921.330.732	76,96
Belanja Barang	63.738.399.000	33.540.260.876	52,62
Belanja Modal	24.935.909.000	14.179.208.356	56,86
Total	109.361.095.000	63.640.799.964	58,19

Tabel II.14 Rincian sisa anggaran per Sumber Dana

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Pagu	Sisa Pagu	%
RM	107.561.095.000	61.846.019.323	45.715.075.677	42,50%
PNBP	1.800.000.000	1.794.780.641	5.219.359	0,29%
SBSN	-	-	-	-
Total	109.361.095.000	63.640.799.964	45.720.295.036	41,81%

II.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya keuangan

Tabel II.15 Rincian penggunaan sumber daya keuangan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III		
		% Capaian Rata-rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi	% Capaian Rata-rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi	% Capaian Rata-rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi
SK 1.	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	75%	21%	54,00%	83%	39,08%	44,25%	90%	62%	28,50%
SK 2.	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	49%	2%	47,00%	49%	37,62%	10,94%	49%	61%	-12,89%
SK 4.	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	38%	11%	27,00%	40%	37%	2,62%	88%	47%	41,14%
SK 5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	24%	6%	18,00%	58%	41,99%	15,79%	76,7%	67%	9,67%
SK 1.	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	33%	37%	-4,00%	92%	60,5%	31,72%	94%	82%	12,07%
Total		44%	15,40%	28,40%	64%	43,24%	21,06%	79,4%	63,74%	15,70%

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa pada Triwulan III dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 79,4%, dengan realisasi anggaran sebesar 63,74% menunjukkan adanya efisiensi antara rata-rata kinerja dengan rata-rata keuangan sebesar 15,70%.

2. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Tabel II.16 Rincian penggunaan sumber daya manusia Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III

No.	Jumlah Kebutuhan SDM	Realisasi SDM	Capaian SDM	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	640	324	50,63%	100%	79%	79%

Berdasarkan tabel data di atas dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan rata-rata target kinerja sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 79% menunjukkan capaian SDM sebesar 50,63% dengan realisasi sebanyak 324 SDM dari jumlah kebutuhan SDM sebesar 640 SDM , dimana realisasi tersebut terdiri atas 159 Orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2 Orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 163 Orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

3. Hambatan dan Kendala

Beberapa hambatan dan kendala masih rendahnya daya serap anggaran antara lain:

- Sistem perencanaan yang masih kurang matang mengenai pemahaman kebutuhan anggaran;
- Masih adanya beberapa kegiatan yang terkena *Automatic Adjustment*.

BAB III

Penutup

BAB III**PENUTUP****III.1. Ringkasan Capaian**

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program. Laporan Monitoring Capaian Kinerja ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sebagai penutup dari Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 ini terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Triwulan III Tahun 2024 Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKK \geq 100\%$) dan 8 (delapan) Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% ($0\% \leq IKK < 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - 1) Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan jalan terealisasi sebesar 71% dengan capaian 71% (target 100%);
 - 2) Jumlah terminal tipe a dan terminal barang yang beroperasi terealisasi sebesar 4 lokasi dengan capaian 100% (target 4 lokasi);
 - 3) Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi 4 lokasi dengan capaian 100% (target 4 lokasi);
 - 4) Persentase pelaksanaan SPM di Terminal Tipe A terealisasi 68,51% dengan capaian 72% (target 95%);
 - 5) Persentase pelaksanaan SPM di Pelabuhan SDP terealisasi 25% dengan capaian 25% (target 100%);
 - 6) Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terealisasi 51% dengan capaian 51% (target 100%);
 - 7) Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat terealisasi 28% dengan capaian 158% (target 67%);
 - 8) Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan terealisasi 0 lokasi dengan capaian 0% (target 10 lokasi);
 - 9) Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan terealisasi 2.269 orang dengan capaian 151% (target 1.500 orang);

- 10) Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor terealisasi 54% dengan capaian 68% (target 80%);
 - 11) Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran terealisasi 1 Lokasi dengan capaian 100% (target 1 Lokasi)
 - 12) Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat tercapai 69 dengan capaian 76,67% (target 90);
 - 13) Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat tercapai 84,3 dengan capaian 93,67% (target 90).
2. Untuk meningkatkan capaian kinerja di selanjutnya, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi akan melakukan monitoring dan pemantauan terhadap kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi.
 3. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi juga akan meningkatkan koordinasi dengan melakukan monitoring keselamatan dan keamanan transportasi darat dan penyeberangan agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju *Zero Accident*.

III.2. Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Adapun hasil evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggung jawab dijabarkan sebagai berikut:

Tabel III.1 Tabel Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target dalam PK	Triwulan III			Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja			
1.	SK 1. Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	100	71	71%	Belum Tercapai	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut.	- Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan - Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4	4	4	100%	Tercapai	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf Terminal Tipe A; 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Terminal Tipe A.	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4	4	4	100%	Tercapai	Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Pelabuhan Penyeberangan.	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target dalam PK	Triwulan III			Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja			
2.	SK 2. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95	95	68,51	72%	Belum Tercapai	Melaksanakan monitoring terhadap SPM di Terminal tipe-A	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100	100	25	25%	Belum Tercapai	Melaksanakan monitoring terhadap SPM di Pelabuhan SDP	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
3.	SK 4. Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	100	51	51%	Belum Tercapai	1. Menginventaris kebutuhan infrastruktur keselamatan jalan; 2. Membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan jalan; 3. Melakukan monitoring terhadap fasilitas jalan yang telah terpasang.	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	67	67	28	158%	Tercapai	1. Menyiapkan infrastruktur UPPKB yang memadai; 2. Menyiapkan SDM yang berkompeten	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan	Lokasi	10	10	0	0%	Belum Tercapai	Membangun fasilitas keselamatan ZoSS apabila anggaran telah tersedia	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500	1500	2.269	151%	Tercapai	Kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan telah dilaksanakan	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80	80	54	68%	Belum Tercapai	1. Melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Perusahaan Karoseri; 2. Melaksanakan Kalibrasi Alat Uji UPUBKB; 3. Pengadaan Alat Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor.	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target dalam PK	Triwulan III			Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja			
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1	1	1	100%	Tercapai	1. Menginventaris kebutuhan fasilitas keselamatan di SDP; 2. Membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan di SDP; 3. Melakukan monitoring terhadap fasilitas SDP yang telah terpasang.	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
4.	SK 5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	90	69	76,67%	Belum Tercapai	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Subbag Tata Usaha
5.	SK 1. Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	90	84,3	93,67%	Belum Tercapai	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	Subbag Tata Usaha

LAMPIRAN



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II JAMBI**

JAMBI, 3 JANUARI 2024

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II JAMBI**

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
2	SK2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100
3	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	1
		IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	10
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1
4	SK5 Meningkatnya kualitas	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat			
5	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

Jambi, 3 Januari 2024

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jambi



EKO INDRA YANTO
NIP. 19790220 200112 1 001



Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2024

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Pande Gede Semarapura, S.Kom., M.Si.	Penyusun Rencana dan Pelaporan	3-1-2024	
		Dina Safitri, S.H.	Pengadministrasi Perkantoran	3-1-2024	
2.	Disetujui	Herry Wanda, S.Sos., M.A.P	Kepala Subbagian Tata Usaha	3-1-2024	
		Yuliana Y.S Panjaitan, S.SiT., M.M.	Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	3-1-2024	
		Harwinanto, S.E., M.T.	Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	3-1-2024	
		Yuliansyah, S.SiT., M.M.	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan	3-1-2024	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Indra Yanto

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. Hendro Sugiatno, M.M.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Jambi, 3 Januari 2024

Pihak Pertama

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jambi

EKO INDRA YANTO
NIP. 19790220 200112 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keberintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
2	SK2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100
3	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	1
		IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	10
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1
4	SK5 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

KEGIATAN**ANGGARAN**

1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 17.500.000.000
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 9.582.899.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 33.625.548.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 4.143.720.000
5.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp. 262.000.000
6.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 6.222.823.000
7.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 17.633.587.000

Disetujui
Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Jambi, 3 Januari 2024
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jambi



EKO INDRA YANTO
NIP. 19790220 200112 1 001



REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Drs. Benny Nurdin Yusuf, A.Md. LLAJ., M.H.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 1 Juli 2024

Pihak Pertama

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jambi

Pihak Kedua

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Irjen Pol. RISYAPUDIN NURSIN, S.I.K
NRP. 66110433

Dr. Drs. BENNY NURDIN YUSUF, A.Md. LLAJ., M.H.
NIP. 19700828 199403 1 007

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

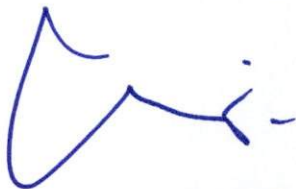
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
2	SK2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100
3	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	67
		IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	10
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1
4	SK5 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

KEGIATAN**ANGGARAN**

1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 17.500.000.000
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 9.582.899.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 33.625.548.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 4.143.720.000
5.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp. 262.000.000
6.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 6.222.823.000
7.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 17.788.818.000

Pihak Kedua

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

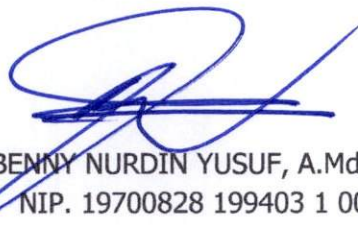


Irjen Pol. RISYAPUDIN NURSIN, S.I.K
NRP. 66110433

Jambi, 1 Juli 2024

Pihak Pertama

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jambi



Dr. Drs. BENNY NURDIN YUSUF, A.Md. LLAJ., M.H.
NIP. 19700828 199403 1 007

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI
TAHUN 2024**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Pelaksana / Penanggung Jawab
						B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
SK 1.	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	1. Subsidi operasional angkutan jalan	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	5.000.000.000	- Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan - Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4	1. Operasional Terminal Penumpang Tipe A : - Terminal Alam Barajo - Terminal Sribulan Sarolangun - Terminal Bangko Merangin - Terminal Bungo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8.233.829.000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4	1. Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan : - Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal - Pelabuhan Sungai Ps. Angso Duo - Pelabuhan Sungai Nipah Panjang - Pelabuhan Sungai Mendahara	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1.349.070.000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
SK 2.	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95	1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	7,9167	7,9167	7,9167	7,9167	7,9167	7,9167	7,9167	7,9167	7,9167	7,9167	7,9167	1.354.000.000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100	1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	1.354.000.000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
SK 4.	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	1. Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	2.032.881.000	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
						2. Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK)												3.090.809.000	
						3. Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)												22.361.814.000	
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	1	1. Operasional UPPKB -UPPKB Jambi Merlung -UPPKB Muara Tembesi -UPPKB Sarolangun -UPPKB Sungai Penuh	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6.363.734.000	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Pelaksana / Penanggung Jawab
						B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
		IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	10	- Kota Jambi; - Kab. Batanghari - Kab. Merangin - Kab. Bungo - Kab. Tanjab Barat	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	-	2.750.000.000	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500	1. Kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	350.000.000	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80	1. Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Perusahaan Karoseri 2. Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	235.000.000	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1	1. Pengadaan dan pemasangan rambu sungai di sungai Batanghari (100 Unit) termasuk supervisi 2. Pemeliharaan Rambu Sungai dan Danau	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.800.000.000	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
SK 5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	1. Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	4.143.720.000	Subbag Tata Usaha
SK 1.	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	1. Program Dukungan Manajemen	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	24.118.410.000	Subbag Tata Usaha

Jambi, 5 Januari 2024
Kepala Balai

Eko Indra Yanto
NIP. 19790220 200112 1 001

**REVISI I RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI
TAHUN 2024**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Pelaksana/Penanggung Jawab
						B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
SK 1.	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	1. Subsidi operasional angkutan jalan	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	90	100	5.000.000.000	- Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan - Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4	1. Operasional Terminal Penumpang Tipe A: - Terminal Alam Barajo - Terminal Sribulan Sarolangun - Terminal Bangko Merangin - Terminal Bungo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8.233.829.000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4	1. Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan : - Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal - Pelabuhan Sungai Ps. Angso Duo - Pelabuhan Sungai Nipah Panjang - Pelabuhan Sungai Mendahara	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1.349.070.000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
SK 2.	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95	1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	90	95	8.233.829.000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100	1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	90	100	1.354.000.000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
SK 4.	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	1. Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	90	100	1.972.312.000	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
					2. Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK)													3.057.250.000	
					3. Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)													17.332.252.000	
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	1	1. Kegiatan penindakan kendaraan angkutan barang pada UPPKB sebanyak 3 UPPKB: 1. UPPKB Jambi merlung; 2. UPPKB Tembesi; 3. UPPKB Sarolangun.	5.583	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	67	6.363.734.000	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
		IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	10	- Kota Jambi: - Kab. Batanghari - Kab. Merangin - Kab. Bungo - Kab. Tanjab Barat	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2.750.000.000	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Pelaksana/Penanggung Jawab
						B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500	1. Kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500	-	-	-	350.000.000	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80	1. Pelaksanaan akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)	0	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	80	235.000.000	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
					2. Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Perusahaan Karoseri														
					3. Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor														
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1	1. Pengadaan dan pemasangan rambu sungai di sungai Batanghari (100 Unit) termasuk supervisi	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1.800.000.000	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
					2. Pemeliharaan Rambu Sungai dan Danau														
SK 5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	1. Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan teknis transportasi darat terdiri dari: a) Aspek perencanaan; b) Aspek kepegawaian (SDM); c) Aspek keuangan; d) Aspek penyelenggaraan perkantoran (umum).	5	10	15	20	30	40	45	50	60	70	80	90	4.143.720.000	Subbag Tata Usaha
SK 1.	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	1. Kegiatan penyelenggaraan perkantoran	5	10	15	20	30	40	45	50	60	70	80	90	24.273.641.000	Subbag Tata Usaha

Jambi, 1 Juli 2024
Kepala Balai


Dr. Drs. BENNY NURDIN YUSUF, A.Md. LLAJ., M.H.
NIP. 19700828 199403 1 007

MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI

BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-9				Realisasi Bulan-9		Capaian Bulan-9		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Pelaksana / Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%							
SK 1.	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	1. Subsidi operasional angkutan jalan	Jumlah Lintas Angkutan Jalan Perintis	Layanan Angkutan Jalan Perintis	75	100	4.803.741.000	100	71	3.261.133.840	95%	67,89%	Belum Tercapai	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut.	- Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan - Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4	1. Operasional Terminal Penumpang Tipe A : - Terminal Alam Barajo - Terminal Sribulan Sarolangun - Terminal Bangko Merangin - Terminal Bungo	Jumlah Terminal Penumpang Tipe-A dikelola	Pelayanan Transportasi Darat	4	100	8.233.829.000	100	4	5.427.986.642	100%	65,92%	Tercapai	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf Terminal Tipe A; 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Terminal Tipe A.	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4	1. Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan : - Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal - Pelabuhan Sungai Ps. Angso Duo - Pelabuhan Sungai Nipah Panjang - Pelabuhan Sungai Mendahara	Jumlah Pelabuhan SDP	Pengawasan Operasional Pelabuhan SDP	4	100	1.349.070.000	100	4	653.723.206	100%	48,46%	Tercapai	Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Pelabuhan Penyeberangan.	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
SK 2.	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95	1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	Monitoring Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	71,25	100	8.233.829.000	100	68,51	5.427.986.642	96%	65,92%	Belum Tercapai	Melaksanakan monitoring terhadap SPM di Terminal tipe-A	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100	1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	Monitoring Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	75	100	903.946.000	100	25	485.660.719	33%	53,73%	Belum Tercapai	Melaksanakan monitoring terhadap SPM di Pelabuhan SDP	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
SK 4.	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	1. Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	Melaksanakan kegiatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan	Terlaksananya kegiatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan	75	100	1.769.023.000	100	51	1.711.290.000	68%	96,74%	Belum Tercapai	1. Menginventaris kebutuhan infrastruktur keselamatan jalan; 2. Membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan jalan; 3. Melakukan monitoring terhadap fasilitas jalan yang telah terpasang.	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
					2. Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK)					3.057.250.000	100		2.932.000.000	95,90%				
					3. Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)					35.332.252.000	100		16.714.135.050	47,31%				
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	67	Kegiatan penindakan kendaraan angkutan barang pada UPPKB sebanyak 3 UPPKB: 1. UPPKB Jambi merlung; 2. UPPKB Tembesi; 3. UPPKB Sarolangun.	Jumlah kendaraan barang yang ditimbang / diperiksa	Menurunnya jumlah kendaraan barang yang melanggar	50,25	100	6.363.734.000	100	28	3.887.955.950	158,20%	61,10%	Tercapai	1. Menyiapkan infrastruktur UPPKB yang memadai; 2. Menyiapkan SDM yang berkompeten	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
		IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	10	Pembangunan ZoSS di Provinsi Jambi: - Kota Jambi; - Kab. Batanghari - Kab. Merangin - Kab. Bungo - Kab. Tanjab Barat	Melaksanakan Pembangunan ZOSS	Terlaksananya Pembangunan ZOSS	10	100	2.750.000.000	100	0	-	0%	0%	Belum Tercapai	Kegiatan tersebut terkena Automatic Adjustmet	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500	1. Kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan	Melaksanakan Kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan	Terlaksananya Kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan	1500	100	350.000.000	100	2269	-	151%	0%	Belum Tercapai	Pelaksanaan kegiatan diperkirakan terlaksana bulan September Tahun 2024	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan		

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-9				Realisasi Bulan-9		Capaian Bulan-9		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Pelaksana / Penanggung Jawab	
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran				
								Volume	%	Volume	%								Volume
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80	1. Pelaksanaan akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)	Melaksanakan kegiatan akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB), Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Perusahaan Karoseri, dan Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	Terlaksananya kegiatan akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB), Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Perusahaan Karoseri, dan Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	60	100	185.074.000	100	54	120.025.268	90%	64,85%	Tercapai	1. Melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Perusahaan Karoseri; 2. Melaksanakan Kalibrasi Alat Uji UPUBKB.	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
		2. Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Perusahaan Karoseri																	
		3. Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor																	
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1	1. Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan pelayaran alur Batanghari (100 Unit) termasuk supervisi	Melaksanakan pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Sungai	Terlaksananya pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Sungai	1	100	1.800.000.000	100	1	1.794.780.641	100%	99,71%	Tercapai	1. Menginventaris kebutuhan fasilitas keselamatan di SDP; 2. Membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan di SDP; 3. Melakukan monitoring terhadap fasilitas SDP yang telah terpasang.	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
2. Pemeliharaan Rambu Sungai dan Danau																			
SK 5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	1. Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan teknis transportasi darat terdiri dari: a) Aspek perencanaan; b) Aspek kepegawaian (SDM); c) Aspek keuangan; d) Aspek penyelenggaraan perkantoran (umum).	Terlaksananya kualitas penyelenggaraan teknis transportasi darat	67,5	100	4.143.720.000	100	69	2.776.075.663	102%	66,99%	Tercapai	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan teknis transportasi darat	Subbag Tata Usaha
SK 1.	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	1. Program Dukungan Manajemen	Kegiatan meningkatkan kualitas penyelenggaraan perkantoran	Terlaksananya kualitas penyelenggaraan perkantoran yang baik	67,5	100	27.171.610.000	100	84,3	20.724.259.314	125%	76,27%	Tercapai	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan perkantoran yang baik	Subbag Tata Usaha

